

**PERANAN CAMAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KECAMATAN MERIGI KELINDANG
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**



**LAPORAN PRAKTIK
PROFESI KEPAMONGPRAJAAN**

Oleh

**NAMA : YARMI
NIM : 023.12.020**

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PROGRAM PROFESI KEPAMONGPRAJAAN
TAHUN AKADEMIK 2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Peran Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Merigi
Kelidang Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu

Nama : Yarmi

NIM : 023.12.020

Program : Profesi Kepamongprajaan

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Tanggal Persetujuan :

Tempat Persetujuan :

DOSEN PEMBIMBING,



(Drs. James Robert Pualillin, M.Si)

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK PROFESI KEPAMONGPRAJAAN**

Nama : Yarmi
NIM : 023.12.020
Angkatan : XII (Dua Belas)
Tahun Akademik : 2023

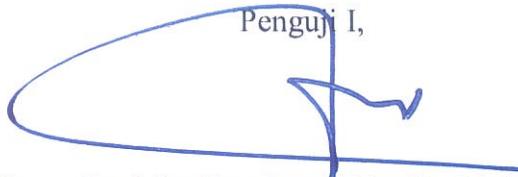
Mengetahui:

Dosen Pembimbing,



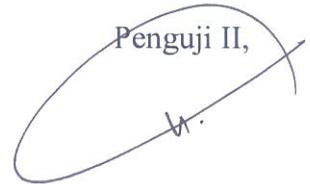
Drs. James Robert Pualillin, M.Si
NIP. 1969 0906 19 9003 1002

Penguji I,



Prof. Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si
NIP. 1969 0527 1990 11 1001

Penguji II,



Dr. Andi Azikin, M.Si
NIP. 1972 1223 1992 02 1001

Direktur Program Profesi Kepamongprajaan IPDN,



Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, MM.
NIP. 19621208 198503 2 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363 Telp. (022) 7798252 - 7798253, Fax. (022) 7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>
Jl. Ampera Raya, Kel. Cilandak Timur, Jakarta Selatan Kode Pos 12560
Telp./Fax. (021) 7806602, Website. <http://www.ppkp.ipdn.ac.id>

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
KEPAMONGPRAJAAN
ANGKATAN XII-KELAS ASTHA TAHUN AKADEMIK 2023-2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Y a r m i
NIM : 023.12.020
Judul Laporan Praktik : PERAN CAMAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN MERIGI KELINDANG
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU
Asal Daerah : Kabupaten Bengkulu Tengah.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktik yang saya susun ini adalah asli hasil karya sendiri bukan hasil jiplakan/plagiat baik sebagian maupun secara keseluruhan dari karya tulis orang lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran tanpa tekanan dari siapapun. Apabila dikemudian hari ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran akademik tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi dicabut ijazah serta gelar yang telah diberikan pada saya.

Jakarta Nopember 2023

Yang membuat pernyataan,

(Y a r m i)

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Praktik Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas ujian akhir Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta Angkatan XII Tahun 2023.

Dalam penulisan proposal laporan praktik ini sangat berharap dapat bermanfaat bagi semua stakeholder yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah pada umumnya dan khususnya di Kecamatan Merigi Kelintang. Rasa terima kasih sudah selayaknya penulis sampai kepada :

1. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Bapak Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta.
4. Ibu Direktur program Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta
5. Bapak Dosen Pembimbing dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan.
6. Bapak/Ibu Dosen, para Guru Besar yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar pada IPDN Jakarta.
7. Staf dan Karyawan IPDN Jakarta yang selalu membantu dalam kelancaran pembelajaran.
8. Bapak Camat Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah memberikan izin dan membantu kelancaran penulisa dalam penyelesaian laporan ini.
9. Bapak/Ibu dan semua pihak yang telah memberikan waktu serta perhatian kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya laporan ini.

10. Teman-teman seangkatan dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta, terima kasih atas kerjasamanya.
11. Terimakasih tak terhingga kepada keluarga ku, yang senantiasa terus memberikan perhatian kepada penulis, berkorban untuk keberhasilan penulis dalam menggapai cita-cita. Cinta dan perhatian kalian adalah motivasi berharga untuk penulis.

Akhirnya pada kesempatan ini penulis mengharapkan agar laporan ini dapat berguna bagi kita semua. Penulis menyadari dengan sepenuhnya dalam laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, saran dan masukan dari semua pihak diperlukan agar kiranya penulis dapat melakukan perbaikan.

Jakarta, Desember 2023



Yarmi

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER LAPORAN PRAKTIK LAPANGAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Kegunaan	8
BAB II. TINJAUAN LEGALISTIK DAN TEORITIK.....	9
2.1. Tinjauan Legalistik	9
2.2. Tinjauan Teoritik	13
2.2.1. Pengertian Perencanaan.....	13
2.2.2. Pengertian Perencanaan Partisipatif	16
2.2.3. Pengertian Pembangunan Berbasis Masyarakat (<i>Community Development</i>)	19
2.2.4. Perencanaan Daerah	20
2.2.5. Tahapan dalam Perencanaan	21
2.3. Kerangka Pemikiran	23
BAB III. METODE PELAKSANAAN	26
3.1 Ruang Lingkup Pelaporan	26
3.2. Teknik Pengumpulan Data	26
3.3. Lokasi dan Jadwal	27

BAB IV. LAPORAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Gambaran Umum	28
4.1.1. Lokasi Praktik (Geografi, Topografi, Demografi, dan Sosial Budaya).....	28
4.1.2. Gambaran Pelaksanaan Tugas Camat	30
4.1.2.1. Pelaksanaan Tugas Urusan Pemerintahan Umum.	30
4.1.2.2. Pelaksanaan Tugas Atributif.....	31
4.1.2.3. Pelaksanaan Tugas Delegatif.....	34
4.1.2.4. Pelaksanaan Tugas Pemerintah Lainnya	35
4.2. Pembahasan	36
4.2.1. Analisis Teoritis Fakta Empiris Sesuai Tema Praktik	36
4.2.1.1. Peranan Camat dalam Penyusunan Program Pembangunan Pedesaan di Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah.....	39
4.2.1.2. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Program Pembangunan.....	48
4.2.1.3. Peran Perencanaan Partisipatif Masyarakat Pedesaan terhadap Pembangunan Pedesaan di Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah.....	54
4.2.2. Alternatif Pemecahan Masalah	61
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	 63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	64
 DAFTAR PUSTAKA	 65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian.....	27
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin menurut desa di Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah	29
Tabel 4.2. Tanggapan Responden Apakah Masyarakat Mengetahui Apa yang Menjadi Program Pembangunan di Kecamatan Merigi Kelindang	39
Tabel 4.3. Tanggapan Responden Apakah Partisipasi Masyarakat diperlukan dalam Perencanaan Pembangunan Pedesaan	40
Tabel 4.4. Tanggapan Responden Apakah Partisipasi Masyarakat diperlukan dalam Perencanaan Pembangunan Pedesaan	41
Tabel 4.5. Tanggapan Responden apakah jalur perencanaan partisipatif yang selama ini dilakukan sudah memenuhi kaidah-kaidah program pembangunan pedesaan.....	42
Tabel 4.6. Tanggapan Responden Apakah Penetapan Prioritas Perencanaan Sesuai dan Selaras dengan Penetapan Prioritas Rencana Kegiatan	43
Tabel 4.7. Tanggapan Responden sejauh mana efektivitas dari proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan pedesaan yang selama ini dilakukan.....	43
Tabel 4.8. Tanggapan Responden apakah program yang dilakukan dengan perencanaan partisipatif mampu menyelesaikan pekerjaan, sehingga tidak ada yang tertunda.	44
Tabel 4.9. Tanggapan Responden apakah selama ini kegiatan program yang dilakukan dengan perencanaan partisipatif mampu memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai harapan	45
Tabel 4.10. Tanggapan Responden Apakah Manfaat Hasil Keputusan dari Perencanaan Partisipatif sudah Sesuai dengan Pencapaian Tujuan yang diharapkan	45

Tabel 4.11.	Tanggapan Responden apakah kegiatan musyawarah pembangunan desa sudah dilaksanakan di Kecamatan Kecamatan Merigi Kelindang sesuai dengan aturan.....	46
Tabel 4.12.	Tanggapan Responden Apakah menurut Anda, peran pemerintah dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan pedesaan.....	48
Tabel 4.13.	Tanggapan Responden Apakah Penyelenggaraan kegiatan musyawarah pembangunan desa terbangun komunikasi dua arah yang baik antara pemerintah dan masyarakat	49
Tabel 4.14.	Tanggapan Responden Apakah masyarakat sering terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa	49
Tabel 4.15.	Tanggapan Responden apakah masyarakat mempunyai antusias yang tinggi akan adanya musyawarah pembangunan desa.	50
Tabel 4.16.	Tanggapan Responden Apakah menurut anda program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa	50
Tabel 4.17.	Tanggapan Responden Apakah masyarakat mengetahui apa yang menjadi program pembangunan di kecamatan tersebut	51
Tabel 4.18.	Tanggapan Responden Apakah dengan adanya musyawarah pembangunan desa permasalahan yang ada dapat teratasi.....	51
Tabel 4.19.	Tanggapan Responden Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam membantu administrasi pembangunan pedesaan.	52
Tabel 4.20.	Tanggapan Responden Apakah setiap aktivitas kegiatan masyarakat ikut berperan penting dalam pencapaian keberhasilan program pembangunan	53
Tabel 4.21.	Tanggapan Responden sejauh mana masyarakat ikut dalam memanfaatkan hasil dari pembangunan pedesaan.	53
Tabel 4.22.	Tanggapan Responden sejauh mana program pembangunan yang ada sudah berpihak terhadap kebutuhan masyarakat setempat.....	54
Tabel 4.23.	Tanggapan Responden apakah sistem perencanaan pembangunan yang sudah ada selama ini dapat menampung seluruh usulan dari masyarakat.....	55
Tabel 4.24.	Tanggapan Responden apakah program pembangunan di Kecamatan Merigi Kelindang sudah berjalan dengan baik.....	56

Tabel 4.25.	Tanggapan Responden apakah terdapat kesesuaian antara program pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah dengan hasil musyawarah pembangunan desa yang telah dilaksanakan sebelumnya disajikan	56
Tabel 4.26.	Tanggapan Responden Berdasarkan pengalaman apakah perencanaan partisipatif sudah sesuai antara target sasaran dengan harapan dan tuntutan masyarakat.	57
Tabel 4.27.	Tanggapan Responden apakah rencanan kegiatan perencanaan yang dirumuskan mempunyai kejelasan tujuan yang akan dicapai.	58
Tabel 4.28.	Tanggapan Responden apakah perencanaan partisipatif yang direncanakan ada kesesuaian dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.....	58
Tabel 4.29.	Tanggapan Responden apakah perencanaan partisipatif yang direncanakan ada kesesuaian dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.....	59
Tabel 4.30.	Tanggapan Responden apakah pengambilan keputusan dalam perencanaan partisipatif sudah mengakomodir hasil kesepakatan bersama.....	60
Tabel 4.31.	Tanggapan Responden Sejauhmana peran perencanaan parrtisipatif dalam pembuatan keputusan yagn dibutuhkan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pedesaan	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan pergerakan pembangunan di Indonesia akibat adanya otonomi daerah, telah membawa perubahan yang cukup besar bagi perencanaan pembangunan di negara ini. Kegiatan pembangunan yang tadinya menekankan pada kekuatan pemerintah pusat, dengan pendekatan sektoral sebagai penggerak utama pembangunan dan proses perencanaan yang lebih mengarah kepada *top-down planning* mulai berubah pada pembangunan yang menekankan pada kekuatan daerah sebagai inti pembangunan, dengan perencanaan regional sebagai penggerak utama dan proses perencanaan pembangunan yang dititikberatkan pada proses *bottom-up planning*. Kondisi ini diharapkan hanya sebagai batu loncatan bagi upaya pembangunan yang lebih menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat dimana kekuatan pembangunan ditekankan pada kekuatan rakyat, dengan pendekatan pembangunan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat dan proses perencanaan yang bersifat partisipatif.

Pembangunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan spesifikasi wilayah dan sosial masyarakat setempat akan lebih bermanfaat dibandingkan dengan pembangunan yang dilaksanakan dengan mengacu pada model-model pembangunan tertentu. Evolusi pembangunan di Indonesia akibat adanya otonomi daerah, telah membawa perubahan yang cukup besar bagi perencanaan pembangunan di negara ini. Kegiatan pembangunan yang tadinya menekankan pada kekuatan pemerintah pusat, dengan pendekatan sektoral sebagai penggerak utama pembangunan dan proses perencanaan yang lebih mengarah kepada *top-down planning* mulai berubah pada pembangunan yang menekankan pada kekuatan daerah sebagai inti pembangunan, dengan perencanaan regional sebagai penggerak utama dan

proses perencanaan yang dititikberatkan pada proses *bottom-up planning*. Kondisi ini diharapkan hanya sebagai batu loncatan bagi upaya pembangunan yang lebih menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat – dimana kekuatan pembangunan ditekankan pada kekuatan rakyat, dengan pendekatan pembangunan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat dan proses perencanaan yang bersifat partisipatif.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat diperlukan peran serta dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga non pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Namun berbagai komponen yang dimaksud menghadapi masalah secara internal yang penyelesaiannya memerlukan penanganan secara integral. Dengan demikian, model pembangunan yang berpusat kepada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*). Model ini memandang inisiatif-kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material-spiritual rakyat sebagai tujuan yang harus dicapai oleh proses pembangunan (Hikmat, 2004).

Dalam rangka mensukseskan pembangunan desa sangat bergantung pada kemampuan masyarakat bersama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dengan mendapatkan dukungan dan pembinaan pemerintah, dalam mendayagunakan fungsi dan perannya sebagai perencana pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, sehingga dapat dikatakan bahwa tanggungjawab masyarakat adalah partisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan.

Oleh karena itu sasaran, strategi dan arah pembangunannya adalah desa yang kesemuanya itu diawali dengan suatu perencanaan yang baik. Untuk lebih efektif dan efisien penerapan perencanaan partisipatif ini butuh proses perencanaan yang benar-benar dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat banyak dan bukan hanya sebagai daftar keinginan belaka.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 224 ayat (1) menyatakan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Selanjutnya pada Pasal 225 ayat (1) menyebutkan bahwa tugas dari camat adalah:

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Upaya pemerintah dalam meningkatkan perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan kebijakan penataan kelembagaan pada pemerintahan desa. Dengan menjadikan pemerintah desa sebagai bagian langsung dari birokrasi negara yang melaksanakan tugas yang dibebankan oleh negara di wilayahnya. Penataan kelembagaan dimaksudkan sebagai peningkatan prakarsa dilakukan dengan pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan pemerintah dan tugas pelaksanaan

pembangunan dapat dilakukan melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa, disamping itu terdapat pula Badan Perwakilan Desa (BPD) yang bersama Kepala Desa berwenang menetapkan keputusan desa.

Selain penataan kelembagaan dilakukan pula dengan pemberian bantuan dana motivasi pembangunan desa. Dengan mentransfer sumber-sumber pembangunan dari pusat kepada daerah. Dana Pembangunan Desa (DPD) dimaksudkan sebagai “Dana Motivasi” untuk menggalang tumbuhnya swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Beberapa pengamat menilai, terdapat kecenderungan yang kuat dominasi pemerintah pusat dalam berbagai program pembangunan desa. Pembangunan dengan pola *top down planning* menunjukkan kepeloporan pemerintah yang terlalu besar sehingga hasilnya dalam pembangunan justru tidak banyak menguntungkan karena pembangunan tersebut kurang menyentuh persoalan pokok yang benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan desa setempat kecil.

1.2. Permasalahan

Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati selaku Administrator Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa. Sehingga secepat mungkin memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah pedesaan guna mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dengan memadukan berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan arah kebijakan nasional melalui mekanisme penyusunan program dari perencanaan yang dimulai dari tingkat dusun dan dimusyawarahkan di dalam Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) dilanjutkan dengan temu karya pembangunan atau forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di tingkat kecamatan dan selanjutnya ke Rakorbang II di tingkat kabupaten, yang kemudian ditetapkan dalam APBD dengan skala prioritas tertentu.

Umumnya dalam hal pembangunan pedesaan masih terdapat beberapa kendala keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pedesaan. Hal ini disebabkan antara lain karena : keterbatasan sarana dan prasarana pedesaan, keterbatasan sumber daya manusia di pedesaan untuk melaksanakan pembangunan dalam tempo yang lebih cepat, keterbatasan kemampuan kelambagaan pedesaan, dan keterbatasan kemampuan ekonomi pedesaan.

Dari uraian fenomena-fenomena yang ditangkap sebagai dampak dari pembangunan pedesaan, apabila dilihat dari sudut pandang administrasi pembangunan dan kebijakan politik, yang menjadi persoalan pokok dan sangat mendasar tidak lain adalah kurang efektifnya dalam perencanaan partisipatif program pembangunan pedesaan.

Hal ini disebabkan adanya kecenderungan tingkat partisipasi masyarakat yang tidak optimal di masing-masing desa. Ada yang tingkat partisipatifnya tinggi dan ada pula yang tingkat partisipatifnya rendah. Hal ini diduga karena faktor pelaksanaan *top down planning* yang lebih dominan mengakibatkan lemahnya pelaksanaan tugas pemerintahan desa serta mengabaikan peranan lembaga-lembaga dari nilai-nilai sosial yang telah ada dan berakar dalam kehidupan masyarakat.

Pembangunan perekonomian pedesaan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat pemerintah telah menyiapkan seperangkat kelembagaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perekonomian di kawasan pedesaan. Kelembanggaan tersebut adalah: pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota), kecamatan (koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat), pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga kemasyarakatan, badan usaha milik desa dan badan kerjasama jika desa melakukan kerjasama dengan pihak ke-3). Saat ini Kecamatan Taba Penanjung terdiri dari 13 (tiga belas) desa, dengan luas 85,096 km². Jumlah penduduk di

Kecamatan Taba Penanjung sebanyak 11.556 jiwa yang terdiri dari 5.912 laki-laki dan 5.644 perempuan, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 2889.

Rohe dan Gates *dalam* Jones (1999) yang dipublikasikan *dalam* Syaifullah (2007) menyatakan bahwa rencana yang melibatkan banyak orang, membuat kegiatan lebih berhasil dan dapat memperbaiki keadaan fisik dan memperkuat kesatuan masyarakat sehingga meningkatkan akses dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat. Jadi, partisipasi penduduk secara demokratis itu penting sekali untuk pembuatan rencana. Lebih lanjut dinyatakan bahwa metode partisipatif dapat dilakukan dengan pengumpulan data, indentifikasi masalah, mencari tujuan, merumuskan masalah, penjelasan atau mencari keterangan untuk melaksanakan rencana dan pemantauan atau evaluasi untuk memperbaharui data.

Untuk mencapai proses pembangunan yang berbasis masyarakat dituntut peran serta dari berbagai perangkat pemerintah daerah, antara lain adalah lembaga-lembaga yang ada ditingkat desa antara lain pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, badan usaha milik desa, dan badan kerjasama desa.

Perencanaan dalam manajemen pembangunan selain merupakan fungsi yang pertama dan sangat mendasar serta meresap keseluruhan fungsi manajemen yang lainnya, perencanaan juga harus dirumuskan berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan, antara lain kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan organisasi. Dipihak lain tidak dapat dipungkiri issue tentang nilai pembangunan yang baru, berkaitan dengan reformasi administrasi, pembangunan yang berpusat pada manusia dan pergeseran paradigma perencanaan dari bawah (*bottom up planning*). Telah menambah keyakinan arti penting penelitian, tindakan perbaikan dan perubahan perencanaan di sektor manajemen public, khususnya perencanaan partisipatif terhadap pembangunan pedesaan.

Berdasarkan fenomena yang ditangkap dan perubahan paradigma perencanaan seperti yang disajikan diatas, maka fokus penelitian ini adalah ingin mengungkapkan efektivitas yang ditimbulkan oleh perencanaan partisipatif yang sering dikenal dengan istilah *bottom up planning* terhadap implementasi program pembangunan pedesaan di Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari uraian yang dikemukakan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain :

1. Bagaimana peranan camat selaku pemegang pemerintahan tertinggi di kecamatan dalam sosialisasi perencanaan partisipatif terhadap implementasi program pembangunan pedesaan di Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan pedesaan.
3. Sejauhmanakah peranan perencanaan partisipatif masyarakat desa dalam pencapaian tujuan pembangunan pedesaan.

Agar penelitian ini terfokus pada tujuan penelitian maka penulis membuat batasan penelitian antara lain adalah dengan hanya melihat:

1. Peranan Camat selaku penanggung jawab terhadap Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Merigi Kelindang
2. Sejauh mana partisipasi dari masyarakat kecamatan Merigi Kelindang dalam penyusunan rencana pembangunan melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG) desa di tingkat kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujaun dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh camat selaku pemimpin kecamatan dalam perencanaan partisipatif masyarakat untuk pembangunan pedesaan. Suatu sistem perencanaan yang didasarkan kepada

partisipatif masyarakat, perumusan perencanaan partisipatif, implementasi program pembangunan, dan keberhasilan pembangunan yang seolah-olah ada ketidakjelasan jika dihubungkan dengan konsep dan teori yang sudah ada, dengan demikian dapat diringkas bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan peranan Camat dalam penyusunan program pembangunan pedesaan di Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan pedesaan.

1.4. Kegunaan

Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan perencanaan pembangunan, khususnya dalam bidang pemerintahan dapat merangsang kegiatan penelitian lainnya secara lebih mendalam tentang perencanaan partisipatif dalam program pembangunan pedesaan serta pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Secara teoritis manfaat penelitian bagi dunia akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan terutama dalam hal pengembangan pengkajian konsep teoritis. Sedangkan bagi penulis sendiri diharapkan dapat meningkatkan pemahaman analisis antara teori dan praktek khususnya dibidang perencanaan pembangunan.

BAB II

TINJAUAN LEGALISTIK DAN TEORITIK

2.1. Tinjauan Legalistik

Proses perencanaan merupakan suatu proses yang sistematis melalui rangkaian berpikir yang berkesinambungan dan rasional untuk memecahkan suatu permasalahan secara sistematis dan berencana. Proses perencanaan akan selalu berkembang sesuai kendala dan limitasi yang ada sehingga rangkaian kegiatan itu dapat dilaksanakan secara objektif dan efisien. Menurut Blakely *dalam* Kuncoro (2004) ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah yaitu :

- (1) Pengumpulan dan analisis data
- (2) Pemilihan strategi Pembangunan daerah
- (3) pemilihan proyek-proyek Pembangunan
- (4) Pembuatan Rencana Tindakan
- (4) Penentuan Rincian Proyek
- (5) Perencanaan Secara keseluruhan dan Impelementasi.

Sementara itu menurut Bendavid-val *dalam* Kuncoro, (2004) menyajikan tahap perencanaan yang berbeda, ada 3 poin yang menarik :

1. Pengumpulan data bukan merupakan suatu tahap dalam proses perencanaan secara keseluruhan, tetapi secara terus menerus berfungsi mendukung dan menyediakan informasi pada setiap tahap perencanaan.
2. Semua tahap dalam proses perencanaan merupakan bagian dari siklus dimana tujuan secara periodik ditinjau kembali, sasaran-sasaran dirumuskan kembali, dan seterusnya

3. Suatu rencana yang sudah disosialisasikan bukanlah merupakan akhir dari suatu proses, tetapi sesuatu yang dihasilkan dari waktu ke waktu untuk kepentingan praktis.

Sistem Informasi perencanaan, sebagai hasil utama dari pengumpulan dan analisis data, seyogyanya mencakup 5 bidang utama :

1. Evaluasi siklus perencanaan sebelumnya.
2. Kinerja dari proyek-proyek pembangunan sebelumnya yang dilakukan di daerah tersebut.
3. Penaksiran sumber-sumber daya pembangunan di luar daerah, tetapi tersedia dan potensial untuk tersedia (dana publik atau swasta yang dapat diinvestasikan pada bidang yang diinginkan oleh pembangunan ekonomi daerah, bakat-bakat khusus atau kapabilitas individual dan lembaga-lembaga yang dapat ditarik dsb)
4. Karakteristik dan dinamika kondisi daerah, khususnya data
5. Perekonomian, infrastruktur, karakteristik fisik dan sosial, sumber daya, dan institusi.
6. Keterkaitan antara kondisi daerah dengan daerah-daerah lainnya

Yang menjadi landasan normatif dalam penelitian ini adalah Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah BAB IV Urusan Pemerintahan Pasal 225 Pasal (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pada Bagian Kelima Tugas Camat Pasal (10).

Camat sebagaimana dimaksud dalam UU No 23 Tahun 2014 Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

- j. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- k. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- l. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

- n. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- o. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- p. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- q. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sementara PP No 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas: menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan Kecamatan;
 - 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi: Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:
 - 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/ wali kota;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
 - 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Tinjauan Teoritik

2.2.1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan hampir sama dengan riset/penelitian, dikarenakan instrumen yang digunakan adalah metode-metode riset. Kegiatannya berawal dari teknik pengumpulan data, analisis data sampai dengan studi lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat. Data yang dilapangan sebagai data penting dan utama yang akan dipakai dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental/spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. (Bratakusumah, 2004)

Awal dan perkembangan perencanaan adalah dimulai dengan perencanaan global sejak berakhirnya PD II dengan dilaksanakannya *Marshal Plann*, untuk membangun Eropa yang hancur akibat PD II. Sejak tahun 1967, terjadilah pergeseran pandangan tentang

perencanaan, yang sejak tahun itu memberikan tekanan kepada *cost effectiveness* melalui identifikasi tujuan. Pergeseran ini menurut Djamaludin (1997:16) dipelopori oleh *Robert Mc Namara* ketika ia memimpin Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dalam pengembangan departemennya, ia segera mengadakan reorganisasi administrasi yang radikal dan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan cara pencapaian tujuan yang terbaik. Penekanan terhadap masalah tujuan ini lebih dipertajam lagi dengan meningkatnya krisis "*Ghetto dan Vietnam war*", sehingga perencanaan tidak lagi terfokus aspek spasial, melainkan terhadap aspek yang lebih luas dan bersifat publik. Menurut pandangan ini perencanaan harus memperhatikan hubungan antara arah, tujuan sasaran disatu pihak dengan instrumen kebijakan umum dipihak lainnya.

Pada awalnya perencanaan merupakan gambaran dari negara-negara berkembang, dan perencanaan itu adalah istilah umum yang dipakai di seluruh bidang di pemerintahan, meskipun penekanan khusus dan teknik perencanaan tergantung pada sistem politik yang dianut. Di negara-negara industri peranan pemerintah sebagai investor, pengatur, stabilisator memberikan pengaruh kepada perencanaan kegiatan sektor swasta.

Lebih lanjut menurutnya, alasan utama membicarakan perencanaan adalah karena pasar sampai saat ini sudah menjadi anarkhis yang tidak lagi dapat menjamin stabilitas atau lapangan kerja yang cukup, yang kebutuhannya dieksploitasi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kepercayaan di masyarakat dan tujuan yang ditetapkan tidak akan dicapai.

Dalam periode awal formulasi perencanaan dipengaruhi oleh pendekatan *Harrold & Domar* (Sadono, 1988) yang menyatakan : bahwa parameter seperti rasio kapital dan menyimpan GNP sehingga suatu rasio akan tetap diterima dan tidak dibutuhkan penjelasannya untuk menurunkan keuntungan. Sebelum pertengahan tahun 1990-an, perencanaan dianggap sebagai sinonim dari industrialisasi.

Selanjutnya muncul filosofi tinggal landas dari *Rostow* yang menyatakan bahwa pertumbuhan, yang awalnya dirangsang akan tumbuh dengan sendirinya. Perencanaan pembangunan dianggap sangat penting untuk tujuan yang sangat bervariasi seperti akselerasi atau percepatan dalam tingkat formasi kapital dan penyimpanan, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan dalam keseimbangan pembayaran, diversifikasi produksi dalam negeri dan swasembada pangan. Semua itu telah mempengaruhi teknik-teknik yang diambil untuk perencanaan.

Pengertian perencanaan itu sendiri ada bermacam-macam, bergantung pada keahlian orang yang menggunakan istilah tersebut. Bagi ahli ekonomi, perencanaan itu mengatur berbagai sumber yang langka secara bijaksana. Bagi seorang arsitek, perencanaan berhubungan dengan pengembangan lingkungan fisik. Bagi seorang perencana, perencanaan meliputi pengaturan dan penyesuaian (bisa dengan mengubah) hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam istilah perencanaan terdapat pengertian bahwa pengaturan dilakukan untuk waktu yang akan datang.

Dilihat dari segi waktu perencanaan, ada perencanaan beberapa tahunan dan perencanaan satu tahunan. Pada awal periode, perencanaan merupakan konsolidasi dari proyek yang terealisasi dan terencana saat belum ditemukan ekonomi makro, perencanaan dibuat untuk jangka waktu lima tahunan. Namun pada tahun 1960-an banyak kesulitan yang dihadapi untuk perencanaan jangka menengah dan ternyata sistem ini tidak fleksibel terhadap perhatian jangka pendek.

Perencanaan biasanya menjelaskan *top down* atau perencanaan *bottom up* dan sistem gabungan, namun dalam pelaksanaan sering ditemukan sistem gabungan dari keduanya. Kehadiran perencanaan pembangunan juga berperan penting dalam memantapkan instrumen baru peningkatan partisipasi masyarakat.

2.2.2 Pengertian Perencanaan Partisipatif

Istilah perencanaan partisipatif pertama kali dicetuskan oleh *Jhon Friedmann* dalam edisi pertama “*Retracking america*” tahun 1973 sebagai refleksi dari guncangan hebat terhadap paradigma perencanaan awal di Amerika Serikat sejak tahun 1960-an. Beliau menulis bahwa perencanaan tidak sekedar sebuah pembuatan rencana, tetapi lebih berarti sebagai proses “belajar bersama”, tidak memberi tekanan pada dokumen tetapi pada dialog dan hasilnya lebih tergantung pada hubungan timbal balik pribadi menurut latar belakang khususnya dan bukan pada lembaga-lembaga yang abstrak.

Gaya perencanaan ini dinamakannya sebagai transaktif dan model yang mendasarinya sebagai proses belajar sosial (*social learning*). Gagasan utama dari pemikiran ini bahwa perencanaan “dari bawah” dapat mencerminkan dengan tepat kepentingan sesungguhnya dari rakyat yang terlibat dalam kegiatan kehidupan sosial mereka (*Friedmann, 1981 dalam Korten dan Sjahrir, 1988:251&257*).

Dalam dunia publik sebagai wilayah tindak kolektif, individu dan kelompok memiliki keterlekatan. Dengan keterlekatan ini berarti tindakan setiap individu atau kelompok mempunyai dampak terhadap individu atau kelompok lainnya. Dalam kenyataannya individu terpisahkan dalam kelompok-kelompok kepentingan tertentu.

Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Abe (2002:81) perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat. Selanjutnya Wicaksono dan Sugiarto *dalam* (Wijaya, 2003:16) ” usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi

agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri. Dari pengertian tersebut bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang tujuannya untuk memperoleh kondisi yang diharapkan, menciptakan aspirasi dan rasa memiliki.

Menurut Abe (2002:85) ada dua bentuk perencanaan partisipatif, *pertama* perencanaan yang langsung disusun bersama rakyat, perencanaan ini bisa merupakan (1) perencanaan lokasi – setempat, yakni perencanaan yang menyangkut daerah dimana masyarakat berada; dan (2) Perencanaan wilayah yang disusun melalui mekanisme perwakilan, sesuai dengan institusi yang sah (legal formal), seperti parlemen. Untuk kasus kedua ini masyarakat seyogyanya masyarakat masih terbuka dalam memberikan masukan, kritik dan kontrol, sehingga apa yang dirumuskan dan diaktualisasikan oleh parlemen benar-benar apa yang dikehendaki oleh masyarakat.

Selanjutnya dinyatakan bahwa prinsip dasar model perencanaan bersama rakyat, yaitu :

1. Adanya saling percaya diantara peserta, saling mengenal dan saling bekejasama. Mengapa diperlukan sebab yang disusun adalah rencana aksi bersama, dengan demikian sejak awal perlu mempunyai dukungan nyata. Saling percaya dibutuhkan agar dalam proses bisa berjalan dengan jujur dan terbuka, tidak merupakan ajang siasat.
2. Kesetaraan diantara peserta, tujuannya agar semua orang bisa berbicara dan mengemukakan pandangannya secara fair dan bebas, maka diantara peserta tidak ada boleh yang lebih tinggi kedudukan. Kesetaraan menjadi hal yang penting bukan menyamakan segi yang berbeda, melainkan membangun suasana dan kondisi setara. Tujuan dasarnya adalah agar semua pihak bisa mengaktualisasikan pikiran secara sehat dan tidak mengalami hambatan. Jika ada pemandu dalam proses, maka pemandu

harus benar-benar berposisi sebagai pemandu dan bukan narasumber, yang pada akhirnya bisa membangun asimetri.

3. Rakyat bisa menyepakati hasil yang diperoleh, baik saat itu harus dihindari praktek perang intelektual, di mana mereka yang berlebihan informasi mengalahkan mereka yang miskin informasi secara tidak sehat. Kekalahan intelektual di forum tidak akan membuahkan penerimaan yang sehat. Oleh sebab itu setiap tahap harus berpegang pada prinsip demokrasi bersama bukan hasil rekayasa satu kelompok. Untuk bisa menghasilkan keputusan bersama dibutuhkan pembahasan yang mendalam, sehingga masing-masing pihak benar-benar bisa paham sebelum keputusan diambil.
4. Keputusan yang baik, tidak didasarkan pada dusta dan kebohongan. Prinsip ini menekankan pada pentingnya kejujuran dalam penyampaian informasi, khususnya pada persolan yang dihadapi. Kejujuran dengan maksud agar apa yang dipersoalkan atau yang menjadi potensi benar-benar sesuatu yang nyata (ada) dan tidak mengada-ada. Hal yang dipentingkan dalam soal ini adalah agar yang diungkapkan benar-benar sesuatu yang menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan hasil rekayasa (cerita palsu).
5. Berproses dengan berdasarkan kepada fakta, dengan sendirinya menuntut cara berfikir yang obyektif. Tujuannya agar para peserta bisa berproses dengan menggunakan kesepakatan yang sudah ditetapkan dan tidak berpindah-pindah dalam menggunakan pijakan. Masalah ini memang masih merupakan tantangan, justru dengan proses inilah diharapkan bisa diperoleh pelajaran bagi rakyat agar lebih terlatih dalam berpikir secara obyektif.
6. Prinsip partisipasi terwujud secara sehat, jika apa yang dibahas merupakan hal yang dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat. Kebutuhan ini mensyaratkan adanya orintasi khusus dari perencanaan, yakni terfokus kepada masalah-masalah masyarakat.

Jika perencanaan dilakukan di tingkat desa, maka dengan sendirinya masalah yang dibahas berorientasi ke desa.

Kemudian bentuk perencanaan partisipatif yang kedua adalah perencanaan perwakilan. Perencanaan ini disusun tidak secara langsung melibatkan masyarakat terutama perencanaan yang disusun oleh pemerintah, dengan pertimbangan dari parlemen. Dalam hal ini masyarakat perlu melakukan dua hal :

1. Mengorganisasikan perencanaan setempat tujuannya agar mulai merumuskan apa yang mereka butuhkan, dan apa yang sebaiknya di kerjakan oleh pemerintah. Pengorganisasikan diperlukan agar kepentingan yang banyak bisa akomodasi. Paada intinya masyarakat harus mulai mengusahakan rumusan-rumusan aspirasi, yang pada nantinya diperjuangkan atau diusahakan untuk dinegosiasikan dengan pihak pemerintah.
2. Melakukan tekanan sistematis pada parlemen dan eksekutif, sedemikian rupa sehingga apa yang disusun oleh elit merupakan apa yang diinginkan rakyat. Hanya dengan kontrol yang sistematis rakyat bisa mengawal perubahan.

2.2.3 Pengertian Pembangunan yang Berbasiskan Masyarakat (*Community Development*)

Menurut Todaro (1998) pembangunan dapat diartikan sebagai proses multidimensi yang didalamnya terkait dengan pengorganisasian kembali dan pengorientasian kembali sistem perekonomian dan sosial masyarakat. Selanjutnya menurut Pryde (1981) dua karakteristik utama dari pembangunan adalah adanya pertumbuhan (*growth*) dan perubahan struktural (*structural change*) yang ditandai dengan adanya modifikasi pada faktor produksi, penggunaan sumber daya yang lebih baik, perubahan pada struktur dan fungsi kelembagaan, serta perubahan pada nilai-nilai dan tingkah laku dari masyarakat.

Selain itu pembangunan juga harus menyebabkan bertambahnya keuletan masyarakat, bertambahnya pilihan baik pada produk ataupun kegiatan, serta perekonomian yang menjadi lebih inovatif.

Dalam pelaksanaan pembangunan saat ini tantangan terbesar adalah pembangunan yang memfokuskan pada manusia (*Human centered development*). Adanya penerimaan yang sangat besar terhadap pendekatan pembangunan yang didasarkan pada pembangunan masyarakat (*community development*), disebabkan karena pendekatan tersebut dianggap potensial untuk menyampaikan tantangan dan isu pembangunan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan khususnya di negara-negara sedang berkembang yang mengalami banyak keterlambatan dalam upaya menjalankan pembangunannya selama ini.

Pelaksanaan pembangunan di wilayah pedesaan menjadi tantangan utama bagi para pengambil kebijakan pembangunan, karena harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada pada masyarakat desa yang mempunyai ciri bahwa sebagian besar aktivitas kegiatan di pedesaan masih berskala kecil, kepadatan penduduk rendah akan tetapi memiliki derajat spesialisasi yang tinggi. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka penerapan pembangunan ekonomi yang didasarkan pada masyarakat (*communitu development*) menjadi sangat berarti dan patut menjadi prioritas utama pelaksanaan pembangunan dikawasan pedesaan karena dapat memberdayakan masyarakat dan sekaligus mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

2.2.4 Perencanaan Daerah

Menurut Abe (2002;30) pengertian perencanaan daerah ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Perencanaan daerah sebagai suatu bentuk perencanaan (pembangunan) yang merupakan implementasi atau penjabaran dari perencanaan pusat (nasional).dalam hal ini bisa terjadi dua kemungkinan : (1) Perencanaan daerah adalah bagian dari

perencanaan pusat, dan (2) Perencanaan daerah adalah penjelasan mengenai rencana nasional yang diselenggarakan di daerah. Proses penyusunannya, bisa dilakukan melalui *top down* atau *bottom Up*

2. Perencanaan daerah sebagai suatu hasil pergulatan daerah dalam merumuskan kepentingan lokal. Dalam soal ini terjadi dua kemungkinan (1) perencanaan daerah sebagai rumusan murni kepentingan daerah tanpa mengindahkan koridor dari pusat (2) Perencanaan daerah tidak lebih sebagai kesempatan yang diberikan pusat untuk diisi oleh daerah

Selanjutnya Kuncoro (2004:46) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab.

Dari pendapat tersebut jelas bahwa perencanaan pembangunan di daerah bukan sekedar perencanaan yang dibuat oleh daerah saja tetapi dalam hal ini perencanaan masih berkaitan dengan perencanaan dengan tujuan perencanaan pembangunan secara nasional. Titik fokusnya perencanaan daerah adalah perencanaan yang bertujuan untuk kepentingan suatu daerah.

2.2.5 Tahapan dalam Perencanaan

Proses perencanaan merupakan suatu proses yang sistematis melalui rangkaian berpikir yang berkesinambungan dan rasional untuk memecahkan suatu permasalahan secara sistematis dan berencana. Proses perencanaan akan selalu berkembang sesuai kendala dan limitasi yang ada sehingga rangkaian kegiatan itu dapat dilaksanakan secara

objektif dan efisien. Menurut Blakely *dalam* Kuncoro (2004:48-49) ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah yaitu :

1. Pengumpulan dan analisis data
2. Pemilihan strategi Pembangunan daerah
3. pemilihan proyek-proyek Pembangunan
4. Pembuatan Rencana Tindakan
5. Penentuan Rincaian Proyek
6. Perencanaan Secara keseluruhan dan Impelementasi.

Sementara itu menurut Bendavid-val *dalam* Kuncoro, (2004:49-50) menyajikan tahap perencanaan yang berbeda, ada 3 poin yang menarik :

1. Pengumpulan data bukan merupakan suatu tahap dalam proses perencanaan secara keseluruhan, tetapi secara terus menerus berfungsi mendukung dan menyediakan informasi pada setiap tahap perencanaan.
2. Semua tahap dalam proses perencanaan merupakan bagian dari siklus dimana tujuan secara periodik ditinjau kembali, sasaran-sasaran dirumuskan kembali, dan seterusnya
3. Suatu rencana yang sudah disosialisasikan bukanlah merupakan akhir dari suatu proses, tetapi sesuatu yang dihasilkan dari waktu ke waktu untuk kepentingan praktis.

Sistem Informasi perencanaan, sebagai hasil utama dari pengumpulan dan analisis data, seyogyanya mencakup 5 bidang utama :

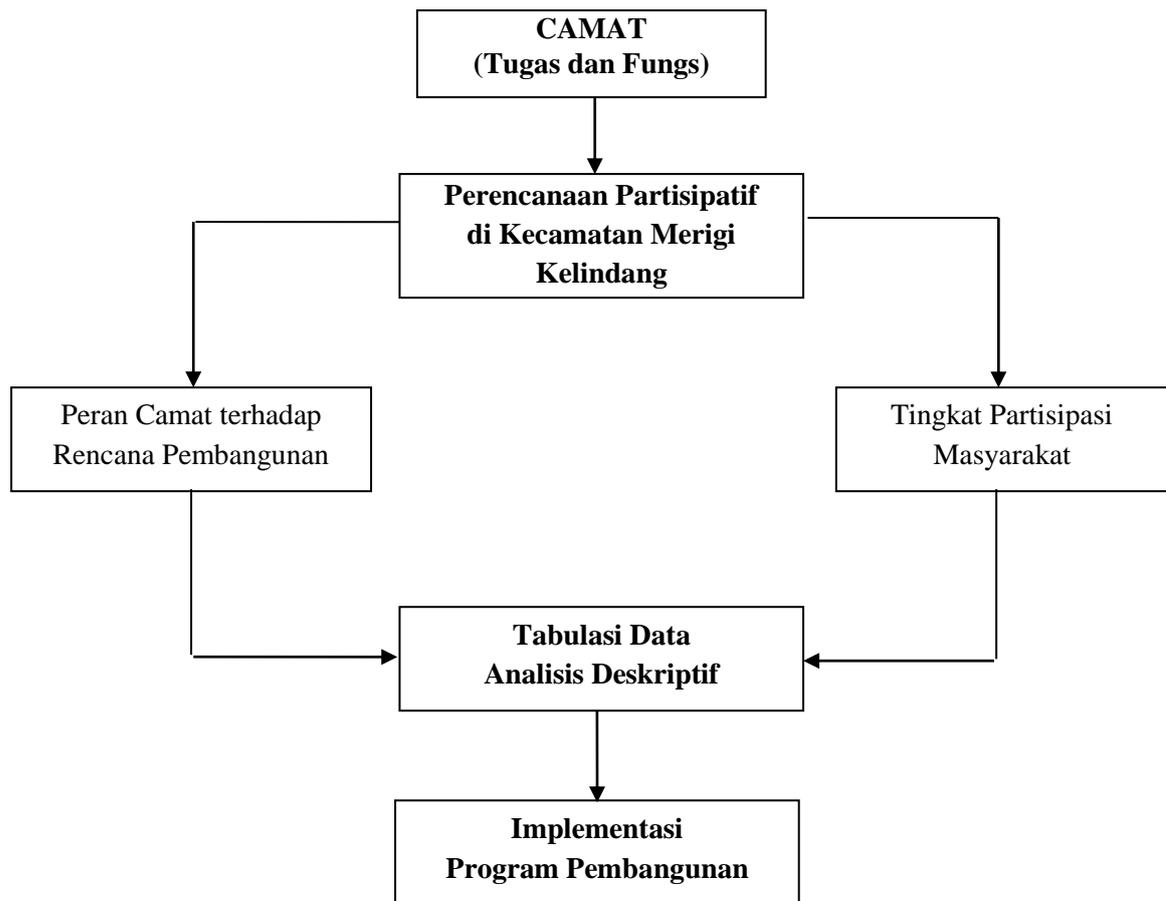
1. Evaluasi siklus perencanaan sebelumnya.
2. Kinerja dari proyek-proyek pembangunan sebelumnya yang dilakukan di daerah tersebut.
3. Penaksiran sumber-sumber daya pembangunan di luar daerah, tetapi tersedia dan potensial untuk tersedia (dana publik atau swasta yang dapat diinvestasikan pada

bidang yang diinginkan oleh pembangunan ekonomi daerah, bakat-bakat khusus atau kapabilitas individual dan lembaga-lembaga yang dapat ditarik dsb)

4. Karakteristik dan dinamika kondisi daerah, khususnya data
5. Perekonomian, infrastruktur, karakteristik fisik dan sosial, sumber daya, dan institusi.
6. Keterkaitan antara kondisi daerah dengan daerah-daerah lainnya

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, landasan teori dan tujuan dari penelitian ini yang akan mendeskripsikan peranan camat dalam penyusunan program pembangunan pedesaan, untuk mengetahui partisipasi masyarakat dan menganalisis peran perencanaan partisipatif tergambar secara ringkas pada kerangka pemikiran di bawah ini. Peranan perencanaan partisipatif yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang bersifat positif dan harus dilihat dengan nyata dalam keikutsertaan pada setiap kegiatan yang ada baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Sehingga terdapat indikasi yang memperlihatkan peluang pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan implementasi program pembangunan pedesaan. Hal ini perlu dibuktikan secara empirik yang secara skematik dapat dilihat pada kerangka analisis berikut ini:



Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran

Untuk melihat tugas dan fungsi seorang camat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan dapat dijelaskan pada alur kerangka pemikiran di atas. Penelitian dimulai dengan mengajukan kusioner kepada responden. Selanjutnya jawaban dari responden akan ditabulasikan. Data akan dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring data yang dibutuhkan. Kemudian data akan dijabarkan dengan bentuk argumentasi yang didasarkan pada data yang telah diperoleh. Dalam menganalisis penulis tidak berdasarkan pada perhitungan kualitatif, tetapi akan dianalisis berdasarkan kemampuan nalar penulis dalam menghubungkan fakta, data dan informasi. Kemudian data akan disusun secara sistematis pada tiap kategori. Kecenderungan masing-masing

kategori akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan dalam penelitian. Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil dari data dan menyimpulkannya sehingga penulis dapat menggambarkan sejauh mana peranan camat dan tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Merigi Kelintang kabupaten Bengkulu Tengah dalam perencanaan partisipatif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di daerah.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Ruang Lingkup Pelaporan

Agar penelitian ini terfokus pada tujuan maka penulis membuat batasan yang terangkum dalam ruang lingkup antara lain adalah dengan hanya melihat peran dari camat selaku penanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan di tingkat desa, dan sejauh mana partisipasi dari masyarakat kecamatan Taba Penanjung dalam penyusunan rencana pembangunan melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG) desa di tingkat kecamatan. Partisipasi masyarakat meliputi, usulan program, pandangan atau persepsi masyarakat terhadap usulan program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner/angket dan menggunakan teknik observasi.

1. Kuesisioner/angket

Dalam pengumpulan data kuesisioner disebarkan dengan sifat tertutup, dimana setiap pertanyaan sudah disediakan alternatif jawaban, sehingga responden hanya tinggal memilih salah satu dari alternatif jawaban yang dianggap sesuai dengan kenyataan.

2. Observasi

Observasi dimaksudkan untuk mengamati secara langsung fenomena yang berhubungan dengan variabel penelitian guna melengkapi data primer yang diperoleh melalui kuesisioner. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap

fenomena yang diteliti. Observasi bertujuan untuk memperoleh suatu data yang lengkap dan rinci melalui pengamatan seksama dengan melibatkan diri dan berpartisipasi dalam fokus yang sedang diteliti.

Metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *cluster sampling* yaitu mengambil wakil dari setiap wilayah yang ada (Suharsimi Arikunto, 2002). Untuk memudahkan penelitian ini 3 (tiga) orang wakil dari masing-masing desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan ketua BPD dengan alasan pengambilan sampel tersebut berdasarkan pertimbangan independensi, mengingat jabatan kepala desa, ketua LKMD dan ketua BPD ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah di desa masing-masing yang dipercaya dapat mengakomodir apresiasi dan permasalahan di desa masing-masing. Jadi total sampel secara keseluruhan adalah 54 orang.

3.3. Lokasi dan Jadwal

Lokasi penelitian dan pengamatan akan dilakukan di Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. Jadwal yang direncanakan dalam penelitian ini adalah selama bulan Oktober sampai bulan Desember 2023.

Jadwal penelitian terangkum dalam rencana penelitian pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Oktober				November				Desember			
		Minggu											
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Proposal penelitian	■											
2	Pembagian Kuisioner		■	■									
3	Tabulasi Data				■								
4	Analisis Data					■	■	■					
5	Penyusunan Laporan Akhir								■	■	■	■	■

BAB IV

LAPORAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Lokasi Praktik (Geografi, Topografi, Demografi, dan Sosbud)

Kecamatan Merigi Kelintang terletak di bagian utara Karang Tinggi, ibukota Kabupaten Bengkulu Tengah. Luas wilayah Kecamatan Merigi Kelintang mencapai lebih kurang 5.935 hektar atau 59,35 kilometer persegi. Ibukota Kecamatan Merigi Kelintang terletak di Desa Lubuk Unen Baru dan terdiri dari 13 desa definitif.

Secara geografis, kecamatan Merigi Kelintang disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang, di sebelah Tengah berbatasan dengan Kecamatan Karang Tinggi, disebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Merigi Sakti, dan disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung.

Kecamatan Merigi Kelintang bila dilihat topografinya berbukit-bukit yang banyak lereng dengan ketinggian berkisar antara 60 – 500 m dpl. Kecamatan ini memiliki luas 59,35 km² dengan 13 Desa. Desa Bajak II merupakan desa yang terluas wilayahnya 9,14 km² atau 15,40% dari total luas wilayah kecamatan. Sementara desa dengan luas terkecil adalah desa Padang Kepar dengan luas 0,84 km² atau hanya 1,42% dari total luas wilayah kecamatan. Disamping itu di Kecamatan ini juga ada 37 dusun. Dari 13 desa yang ada terdapat 5 desa yang masih dalam klasifikasi desa tertinggal, dan 8 desa dengan klasifikasi berkembang.

Penduduk Kecamatan Merigi Kelintang pada tahun 2020 mencapai 7.125 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun di Kecamatan Merigi Kelintang sebesar 1,24 persen. Dari 13 desa yang ada di Kecamatan Merigi Kelintang, Laju pertumbuhan

penduduk per tahun tertinggi adalah di Desa Lubuk Unen yaitu 2,43 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk per tahun terendah adalah Desa Talang Ambung sebesar -1,43 persen.

Jumlah Penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin menurut desa di Kecamatan Merigi Kelintang tersaji pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin menurut desa di Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah

No	Desa	Jumlah Penduduk	Laju Perumbuhan Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	Bajak II	612	1,16	8,590	66,960	117,8
2	Jambu	1.169	0,90	16,41	193,54	109,9
3	Penembang	714	1,13	10,02	116,86	98,30
4	Lubuk Unen	924	2,43	12,97	230,42	102,2
5	Pungguk Ketupat	382	1,05	5,360	122,83	113,4
6	Pungguk Beringin	404	1,40	5,670	118,13	99,00
7	Kelintang	439	0,95	6,160	57,690	93,40
8	Ulak Lebar	415	2,21	5,820	106,50	111,7
9	Taba Durian Sebakul	429	0,90	6,020	115,95	113,4
10	Talang Ambung	118	-1,43	1,660	66,670	114,5
11	Lubuk Unen Baru	737	0,60	10,34	125,98	103,6
12	Padang Kedeper	278	0,99	3,900	330,95	113,8
13	Kelintang Atas	504	1,92	7,070	127,27	114,5

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Merigi Kelintang dalam Angka 2022

Keadaan sosial penduduk Kecamatan Merigi Kelintang digambarkan dalam beberapa variabel antara lain pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, serta agama. Dalam bidang pendidikan, pada tahun 2020 di Kecamatan Merigi Kelintang memiliki gedung sekolah negeri sebanyak 15 yang terdiri dari gedung gedung Sekolah Dasar (SD), gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI) gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP), gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan gedung Sekolah Madrasah Aliyah (MA).

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Merigi Kelindang. Pada tahun 2020 terdapat dua buah puskesmas tanpa rawat inap di wilayah Kecamatan Merigi Kelindang. Di bidang Keluarga Berencana (KB), berdasarkan data dari BPPKB Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2020 jumlah akseptor aktif di Kecamatan Merigi Kelindang sebanyak 1.642 pasangan. Akseptor aktif di Kecamatan Merigi Kelindang umumnya lebih banyak menggunakan alat kontrasepsi suntik dan implan, dimana proporsinya masing-masing mencapai 40,07 persen. Jumlah masjid yang terdapat di Kecamatan Merigi Kelindang sebanyak 13 buah masjid.

4.1.2. Gambaran Pelaksanaan Tugas Camat

4.1.2.1. Pelaksanaan Tugas Urusan Pemerintahan Umum

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang memiliki karakteristik berbeda dengan perangkat daerah maupun organisasi pemerintah daerah lainnya. Jabatan camat di samping memimpin satu unit pemerintahan yang menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang multisektoral juga melaksanakan tugas kewilayahan karena memiliki wilayah kerja. Dengan demikian camat diharapkan memiliki kemampuan sebagai generalis sekaligus spesialis.

Tugas camat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 adalah sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati/ Walikota pada tingkat kecamatan.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam menjalankan tugasnya camat bukan lagi sebagai kepala wilayah tetapi tetap menjalankan koordinasi dengan instansi vertikal dan dinas daerah yang ada di wilayah kecamatan. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pembagian tugas camat sebagai perangkat daerah menjalankan dua fungsi desentralisasi, dan pelimpahan dari instansi yang menugaskan. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang camat yang dalam hal ini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 camat bukan lagi selaku kepala wilayah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetapi menjalankan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan oleh Bupati/ Walikota. Urusan pemerintahan umum tersebut merupakan pendelegasian dari Presiden sebagai kepala pemerintahan kepada Gubernur, selaku wakil pemerintah pusat dan Bupati/Walikota Bupati/Walikota sebagai kepala daerah.

4.1.2.2. Pelaksanaan Tugas Atributif

Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan atributif camat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan di perjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.

Kewenangan atributif camat lebih jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Kecamatan, Tugas dan Kewenangan camat pada bidang . yakni

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang.

Partisipasi menurut Verhangen (1979) merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Musrenbang kecamatan diselenggarakan untuk mensinkronkan hasilhasil perencanaan pasrtisipatif dari tingkat pembangunan dari Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten/kota di kecamatan bersangkutan sehingga dapat menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke musrenbang daerah kabupaten/kota. Tentunya forum ini sangat penting bagi masyarakat pada tingkat kecamatan, sebab mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka. Partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang merupakan suatu hal yang urgen dalam pembangunan nasional maupun daerah.

Forum musrenbang yang diselenggarakan di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dihadiri dari berbagai kalangan, yaitu Tim Musrenbang Kecamatan, Pemerintah kelurahan/Desa, Tokoh Masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, terlihat pasrtisipasi masyarakat dinilai pasif.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang merupakan penentu keberhasilan dan ketepatan sasaran tujuan pembangunan. Pada mulanya, Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah.

Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

2. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Unit Kerja Terkait Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang perlu dilakukan Camat untuk mampu memberdayakan secara penuh setiap anggota masyarakatnya sekaligus untuk mampu mencapai tujuan bersama. Dari Kewenangan Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka ada 3 poin yang ditetapkan antara lain pengarahan, pembinaan dan pengawasan.

Pengarahan yang dilakukan Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal yang sangat perlu dilakukan seorang Camat dalam kepastiannya selaku koordinator kegiatan pemberdayaan bagi masyarakatnya. Pengarahan yang dimaksud adalah bagaimana Camat mengarahkan masyarakatnya agar mampu melakukan program kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga tujuan yang diharapkan mampu tercapai. Dalam melakukan kewenangannya dalam melakukan pengarahan.

3. Melakukan Evaluasi terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan. Hal ini dimaksudkan sebagai tolak ukur dari pencapaian suatu program

kerja kecamatan itu sendiri baik dari segi peningkatan dalam berbagai bidang di suatu daerah. Oleh karena itu, seorang memiliki tugas untuk mengevaluasi dadan dikerjakan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kewenangan Camat untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan pada tingkat kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.

4.1.2.3. Pelaksanaan Tugas Delekatif

Mengacu kepada kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pemerintahan dari Bupati/Walikota. Artinya, apabila tidak diberi pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota maka Camat hanya menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan sebagai perangkat kewilayahan yang melekat dalam tugas atributifnya. Sebagai contoh: pelaksanaan tugas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat telah terbagi habis pada semua Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada, sehingga kedudukan Camat dalam menrealisasikan kewenangan delegatif sesuai Undang-Undang pun tidak teramat kompleks. Camat memiliki kewenangan untuk membina masyarakat desa dan kelurahan yang di bawahinya.

Dalam ketentuan perundang-undangan, yang dimaksud dengan membina adalah komposisi fasilitasi pembentukan rancangan kerja pemberdayaan dan fasilitas masyarakat untuk mendukung kinerja masyarakat. Sebab organisasi kecamatan merupakan lapisan

pemerintahan yang memegang peranan signifikan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan, hal ini menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pengerjaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian tugas otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta-merta memposisikan camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

4.1.2.4. Pelaksanaan Tugas Pemerintah Lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 camat mempunyai tugas antara lain adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Pada bagian Kelima dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 ini pada Pasal 10 point (i) disebutkan bahwa camat dapat melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan tugas camat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya seperti tugas menjaga lingkungan kecamatan agar tetap kondusif terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Camat dapat berkoordinasi dengan pihak keamanan kecamatan seperti Babin Kamtibmas dan Babinsa di wilayahnya masing-masing.

Salain itu camat juga dapat melakukan fungsi pengawasan. Konsep pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan dalam mengawasi, akan tetapi pengawasan juga mengandung berarti bahwa memperbaiki dan meluruskan sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pada dasarnya pengawasan adalah fungsi manajerial yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, tidak terlepas juga camat sebagai kepala wilayah kecamatan. Sebagai salah satu fungsi manajemen dalam pengawasan diharapkan camat dapat melakukan fungsinya demi terwujudnya tujuan. Pengawasan oleh camat selaku pemimpin kecamatan antara lain seperti yang dikemukakan oleh Situmorang dan Juhir (1994) yang menyebutkan bahwa tujuan dari pengawasan adalah :

1. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
3. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisis Teoritis Fakta Empiris Sesuai Tema Praktik

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Merupakan penelitian non hipotesis, sehingga langkah awal penelitian tidak merumuskan hipotesis, karena penulis tidak menguji hipotesis, namun memaparkan temuan topik penelitian di lapangan dan mencari jawaban atau eksplorasi dari masalah yang ditemukan. Praktik lapangan dapat mengungkapkan bahwa peran Camat Kecamatan Merigikelindang Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menggunakan dimensi peranan ditemukan fakta-fakta di lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Adapun hal yang akan di deskriptifkan pada penelitian ini adalah :

1. Mekanisme penyusunan program perencanaan partisipatif meliputi proses perencanaan, tahapan perencanaan, kesesuaian antar sektor, penyelesaian pekerjaan dan perbaikan hasil pekerjaan.
2. Partisipasi masyarakat meliputi tingkat kehadiran, usulan program, pandangan atau persepsi masyarakat terhadap usulan program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
3. Peranan perencanaan partisipatif meliputi sumbangan tenaga, perbantuan modal, perbantuan material, dan pemeliharaan hasil pembangunan.

Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk argumentasi yang didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan teknik perolehan data, baik studi lapangan maupun studi pustaka, didalam menganalisisnya tidak berdasarkan pada perhitungan kualitatif, tetapi pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data dan informasi. Kemudian data yang diperoleh akan disusun secara sistematis pada tiap kategori. Kecenderungan masing-masing kategori akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan dalam penelitian yaitu mekanisme atau tata cara dari perencanaan partisipatif masyarakat terhadap implementasi program pembangunan pedesaan, langkah kedua akan dilakukan deskripsi sejauh mana partisipasi masyarakat dalam perencanaan partisipatif dan pada akhirnya penulis dapat menggambarkan sejauh manakah peranan dari perencanaan partisipatif masyarakat di pedesaan dalam pencapaian tujuan pembangunan tersebut.

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan dari pengamatan lapangan dapat diketahui peranan yang dilakukan oleh Camat Merigi Kelintang menunjukkan Peranannya sebagai suatu Kebijakan, Peran sebagai Strategi, Peran sebagai alat Komunikasi dan Peran sebagai alat Penyelesaian Sengketa.

Keempat peranan tersebut dapat diidentifikasi melalui adanya azas kebersamaan, keikutsertaan, musyawarah, dan keterbukaan yang dikoordinasikan oleh Camat Kecamatan Merigi Kelintang bersama semua pihak yang berkepentingan baik tingkat Kecamatan maupun Desa dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan yang ditunjukkan pada pelaksanaan proses sosialisasi dan koordinasi berjalan dengan baik sehingga memperoleh pemecahan masalah yang dihadapi.

Kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan dengan melibatkan masyarakat dalam menyerap aspirasi terhadap usulan pembangunan-Pembangunan yang ada di desa berjalan dengan baik.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan pedesaan disimpulkan masih tinggi. Hal ini tercermin dari tingkat kemauan dari pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih cukup tinggi. Masyarakat mengetahui mekanisme penyusunan program pembangunan pedesaan di kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan tingkat partisipasi yang tinggi dan sebagian besar masyarakat mengetahui bagaimana cara mereka berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Kemudian keselarahan antara perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan dinyatakan masyarakat selaras dengan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu pula peran perencanaan partisipatif masyarakat pedesaan terhadap program pembangunan pedesaan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berjalan dengan baik. Keikutsertaan masyarakat dalam hal

memberikan masukan dan keterbukaan dari pemerintah daerah dalam menampung aspirasi untuk menyusun rencana pembangunan juga sangat baik.

Dari data yang telah dikumpulkan melalui kusioner dan hasil wawancara terhadap beberapa responden di dapatkan hasil yang digambarkan dengan maksud untuk mencapai tujuan mengetahui peranan camat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pedesaan di Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah, secara sistematis disajikan pada sub bab berikut ini.

4.2.1.1. Peranan Camat dalam Penyusunan Program Pembangunan Pedesaan di Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah

Peranan Camat sebagai pelaksana tugas pemerintah di Kecamatan salah satunya adalah melaksanakan tugas dan fungsi administrasi. Administrasi pembangunan salah satunya adalah menyusun program pembangunan. Langkah awal yang harus ditentukan adalah dengan mulai dari perencanaan menyusun program pembangunan dengan menyerap aspirasi masyarakat sampai pada mengusulkan hasil yang akan dibahas pada tingkat kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah di Tingkat Kabupaten.

Bedasar pada hasil perhitungan dari masing-masing jawaban dari responden untuk setiap item pertanyaan seperti terlihat pada tabel 4.2 secara terinci dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Tanggapan Responden Apakah Masyarakat Mengetahui Apa yang Menjadi Program Pembangunan di Kecamatan Merigi Kelintang

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlah x Skor	Persentase
Apakah masyarakat mengetahui apa yang menjadi program pembangunan di kecamatan Merigi Kelintang	Sangat tahu	0	5	0	0%
	Tahu	32	4	128	59%
	Cukup Tahu	21	3	63	39%
	Sebagian kecil Tahu	1	2	2	2%
	Tidak Tahu	0	1	0	0%
Total		54		193	100%
Rata-rata				3,57	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, terlihat bahwa mayoritas responden (59% atau sebanyak 32 responden) memberikan tanggapan bahwa masyarakat mengetahui apa yang menjadi program pembangunan di kecamatan Kecamatan Merigi Kelindang dan hanya sebagian kecil saja respoden menjawab sebagian kecil tahu (2% atau sebanyak 1 orang responden) sedangkan yang memilih alternatif jawaban cukup tahu sebesar 39% atau 21 orang responden. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tahu apakah pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan jumlah skor untuk untuk pertanyaan di atas adalah 193 dengan tingkat rata-rata 3,57.

Untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat diperlukan dalam perencanaan pembangunan pedesaan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Tanggapan Responden Apakah Partisipasi Masyarakat diperlukan dalam Perencanaan Pembangunan Pedesaan

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlah x Skor	Persentase
Menurut saudara, apakah partisipasi masyarakat diperlukan dalam perencanaan pembangunan pedesaan	Sangat diperlukan	43	5	215	80%
	Diperlukan	11	4	44	20%
	Cukup diperlukan	0	3	0	0%
	Tidak diperlukan	0	2	0	0%
	Sangat tidak diperlukan	0	1	0	0%
Total				259	100%
Rata-rata				4,80	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Tabel di atas terlihat bahwa 43 atau 80% responden menyatakan bahwa partisipasi masyarakat diperlukan dalam perencanaan pembangunan pedesaan, sedangkan 11 respodendn atau 20% menyatakan bahwa partisipasi masyarakat diperlukan dalam perencanaan pembangunan pedesaan.

Dari alternatif jawaban yang dipilih responden ternyata tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pedesaan masih sangat diperlukan (80% atau sebanyak 43 orang responden) dengan jumlah skor 259 atau dengan rata-rata 4,80. Hal ini mempunyai arti bahwa masyarakat sangat ingin terlibat dalam perencanaan pembangunan

pedesaan dan merupakan hal yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi dan masukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang baik dan berkelanjutan.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana masyarakat tahu dan mengerti cara untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan pedesaan dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Tanggapan Responden Apakah Partisipasi Masyarakat diperlukan dalam Perencanaan Pembangunan Pedesaan

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlah x Skor	Persentase
Menurut saudara, apakah masyarakat mengetahui dan mengerti cara untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan partisipatif	Sangat Mengerti	2	5	10	4%
	Sebagian Besar	34	4	136	63%
	Cukup Mengerti	17	3	51	31%
	Sebagi Kecil	1	2	2	2%
	Tidak Mengerti	0	1	0	0%
Total				199	100%
Rata-rata				3,69	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Dari hasil jawaban responden dapat diketahui bahwa sebagai besar masyarakat mengetahui dan mengerti cara untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam perencanaan partisipatif (63% atau sebanyak 34 orang responden), sedangkan yang cukup mengerti (31% atau sebanyak 17 orang) dan yang sangat mengerti (4% atau hanya 2 orang responden). Dengan jumlah skor 199 dan tingkat rata-rata 3,69. Hal ini mengisyaratkan bahwa responden mengerti bagaimana cara untuk ikut serta dalam perencanaan partisipatif pembangunan di pedesaan di Kecamatan Merigi Kelindang .

Selanjutnya peranan sebagai Camat harus memastikan apakah program pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat sudah sesuai dengan alur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai payung hukum untuk melaksanakan proses pembangunan disajikan pada tabel 4.5.

Berdasarkan jawaban responden apakah jalur perencanaan partisipatif yang selama ini dilakukan sudah memenuhi kaidah-kaidah program pembangunan pedesaan dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Tanggapan Responden apakah jalur perencanaan partisipatif yang selama ini dilakukan sudah memenuhi kaidah-kaidah program pembangunan pedesaan

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlah x Skor	Persentase
Apakah jalur perencanaan partisipatif yang selama ini dilakukan sudah memenuhi kaidah-kaidah program pembangunan pedesaan	Sangat Memenuhi	1	5	5	2%
	Sebagian Besar	42	4	168	78%
	Cukup Memenuhi	10	3	30	19%
	Sebagian Kecil	1	2	2	2%
	Tidak Memenuhi	0	1	0	0%
Total				205	100%
Rata-rata				3,80	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Tanggapan responden menyatakan bahwa sebagian besar (78% atau sebanyak 42 orang responden) perencanaan partisipatif pembanguna pedesaan sudah memenuhi kaidah-kaidah program pembangunan pedesaan, dan yang menyatakan cukup memenuhi sebanyak (19% atau sebanyak 10 orang responden), hal ini juga menunjukkan bahwan kaidah atau aturan yang diperlukan sebagai tolok ukur atau dasar pembangunan pedesaan telah terlaksana dengan baik dengan jumlah skor 205 dan rata-rata 3,80.

Camat juga harus mengarahkan setiap usulan masyarakat tetap mengedepankan skala prioritas dengan tetap mengacu pada konsep keadilan. Tidak semua usulan dari masyarakat dapat dimasukkan dalam rencana pembangunan. Skala prioritas tetap menjadi hal utama. Untuk mengetahui tingkat keselarasan antara penetapan prioritas rencana kegiatan kegiatan pembangunan pedesaan dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Tanggapan Responden Apakah Penetapan Prioritas Perencanaan Sesuai dan Selaras dengan Penetapan Prioritas Rencana Kegiatan

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Penetapan Prioritas Perencanaan Sesuai dan Selaras dengan Penetapan Prioritas Rencana Kegiatan	Sangat Selaras	0	5	0	0%
	Selaras	54	4	216	100%
	Kurang Selaras	0	3	0	0%
	Tidak Selaras	0	2	0	0%
	Sangat Tidak Selaras	0	1	0	0%
Total				216	100%
Rata-rata				4,00	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat keselarasan antara penetapan prioritas perencanaan dengan penetapan prioritas rencana kegiatan menurut adalah selaras (100%). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menetapkan rencana pembangunan pedesaan tetap mengacu pada skala prioritas dari masyarakat pedesaan.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan pedesaan yang selama ini dilakukan disajikan pada Tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7. Tanggapan Responden sejauh mana efektivitas dari proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan pedesaan yang selama ini dilakukan

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Efektivitas dari proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan pedesaan yang selama ini dilakukan	Sangat Efektif	0	5	0	0%
	Efektif	52	4	208	96%
	Cukup Efektif	2	3	6	4%
	Kurang Efektif	0	2	0	0%
	Tidak Efektif	0	1	0	0%
Total				214	100%
Rata-rata				3,96	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Pada Tabel 4.7 di atas terlihat bahwa efektivitas dari proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan pedesaan di Kecamatan Kecamatan Merigi Kelindang adalah efektif (96%) dan hanya sebagian kecil responden menyatakan cukup efektif (4%). Berarti bahwa

proses perencanaan partisipatif ini ternyata efektif dilakukan dalam pencapaian pembangunan pedesaan.

Selanjutnya pada Tabel 4.8 berikut disajikan apakah program yang dilakukan dengan perencanaan partisipatif mampu menyelesaikan pekerjaan, sehingga tidak ada yang tertunda.

Tabel 4.8. Tanggapan Responden apakah program yang dilakukan dengan perencanaan partisipatif mampu menyelesaikan pekerjaan, sehingga tidak ada yang tertunda

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan partisipatif mampu menyelesaikan pekerjaan, sehingga tidak ada yang tertunda.	Sangat Mampu	8	5	40	15%
	Mampu	46	4	184	85%
	Kurang Mampu	0	3	0	0%
	Tidak Mampu	0	2	0	0%
	Sangat Tidak Mampu	0	1	0	0%
Total				224	100
Rata-rata				4,15	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Berdasarkan pada Tabel 4.8 di atas ternyata program yang dilakukan dengan perencanaan partisipatif ternyata mampu (85%) menyelesaikan pekerjaan, sehingga tidak ada yang tertunda, sedangkan responden yang menyatakan sangat mampu adalah 15%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat ternyata mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah selama ini kegiatan program yang dilakukan dengan perencanaan partisipatif mampu memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai harapan disajikan pada Tabel 4.9 di bawah ini.

Tabel 4.9. Tanggapan Responden apakah selama ini kegiatan program yang dilakukan dengan perencanaan partisipatif mampu memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai harapan

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Selama ini kegiatan program yang dilakukan dengan perencanaan partisipatif mampu memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai harapan	Sangat Mampu	9	5	45	17%
	Mampu	44	4	176	81%
	Kurang Mampu	1	3	3	2%
	Tidak Mampu	0	2	0	0%
	Sangat Tidak Mampu	0	1	0	0%
Total				224	100%
Rata-rata				4,15	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Dalam hal apakah kegiatan program yang dilakukan dengan perencanaan partisipatif mampu memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai harapan, 81% responden menyatakan mampu dan 17% menyatakan sangat mampu serta 2% responden menyatakan kurang mampu. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa kegiatan program yang dilakukan dengan perencanaan partisipatif ternyata mampu memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat di pedesaan.

Tabel 4.10. Tanggapan Responden Apakah Manfaat Hasil Keputusan dari Perencanaan Partisipatif sudah Sesuai dengan Pencapaian Tujuan yang diharapkan

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Manfaat Hasil Keputusan dari Perencanaan Partisipatif sudah Sesuai dengan Pencapaian Tujuan yang diharapkan	Sangat Sesuai	1	5	5	2%
	Sesuai	53	4	212	98%
	Kurang Sesuai	0	3	0	0%
	Tidak Sesuai	0	2	0	0%
	Sangat Tidak Sesuai	0	1	0	0%
Jumlah				217	
Rata-rata				4,02	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Tanggapan responden terhadap pernyataan Apakah Manfaat Hasil Keputusan dari Perencanaan Partisipatif sudah Sesuai dengan Pencapaian Tujuan yang diharapkan adalah 53% responden menyatakan sesuai, dan 2% responden menyatakan sangat sesuai, hal ini dapat diartikan bahwa manfaat dari hasil keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan partisipatif ternyata sudah sesuai dengan pencapaian tujuan yang diharapkan

terhadap pembangunan di pedesaan. Selanjutnya pada tabel 4.11 ditampilkan tanggapan responden terhadap apakah kegiatan musyawarah pembangunan desa sudah dilaksanakan di Kecamatan Kecamatan Merigi Kelindang sesuai dengan aturan.

Tabel 4.11. Tanggapan Responden apakah kegiatan musyawarah pembangunan desa sudah dilaksanakan di Kecamatan Kecamatan Merigi Kelindang sesuai dengan aturan

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Kegiatan musyawarah pembangunan desa sudah dilaksanakan di Kecamatan Kecamatan Merigi Kelindang sesuai dengan aturan.	Sangat Sesuai	3	5	15	6%
	Sesuai	51	4	204	94%
	Kurang Sesuai	0	3	0	0%
	Tidak Sesuai	0	2	0	0%
	Sangat Tidak Sesuai	0	1	0	0%
Jumlah				219	100
Rata-rata				4,06	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Dari hasil penelitian terlihat bahwa sebanyak 94% responden menyatakan bahwa kegiatan musyawarah pembangunan desa yang dilaksanakan di kecamatan Kecamatan Merigi Kelindang sudah sesuai dengan aturan, dan 6% responden memilih jawaban sangat sesuai atau sebesar 6%. Hal ini mengindikasikan bahwa aturan aturan dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan desa ternyata sudah dapat dimengeri oleh responden, sehingga dalam pelaksanaan musyawarah desa tidak menemui kendala yang berarti.

Dari 10 pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mencapai tujuan penelitian yang pertama yaitu dalam hal mekanisme penyusunan program pembangunan pedesaan di Kecamatan Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah diperlukan suatu wadah untuk mengakomodir usulan dari masyarakat yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa (BPD). Adapun tugas dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah sebagai wadah dari semua usaha dan kegiatan masyarakat desa dalam pembangunan, menampung dan melaksanakan aspirasi dan inisiatif dari kalangan masyarakat dan melaksanakan berbagai tugas yang dibebankan oleh instansi pemerintah. Sedangkan fungsi dari LKMD itu

sendiri adalah sebagai koordinator perencanaan pembangunan dalam segala bidang yang berasal dari masyarakat.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa mekanisme penyusunan program pembangua pedesaan di Kecamatan Kecamatan Merigi Kelindang telah melibatkan masyarakat, efektif, sesuai aturan, sesuai dengan pencapaian tujuan, telah sesuai dengan skala prioritas pembangunan, dan telah memenuhi kaidah-kaidah pembangunan pedesaan. Peranan pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat terhadap usulan rencana pembangunan terlihat sangat jelas. Mulai dari mengajak masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan sampai pada akhirnya menyimpulkan usulan dari rencana pembangunan. Dari hasil jawaban responden tersebut camat selaku perwalikan pemerintah mengetahui secara rinci hal apa saja yang diusulkan oleh masyarakat. Secara hirarki bahwa camat telah menjalankan rencana program pembangunan di daerahnya, dengan cara melibatkan masyarakat dalam hal usulan pembangunan di daerah. Peranan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab camat selaku perpanjangan tangan pemerintah telah dilakukan dengan baik.

Selanjutnya tugas dari seorang camat sebagai penanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas administratif pemerintah kecamatan telah dilakukan dengan baik. Salah satunya adalah dengan menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka pembangunan daerah. Dari jawaban responden terhadap pernyataan yang telah diajukan terlihat bahwa selaku pemimpin daerah kecamatan bahwa camat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, mulai dari mengajak masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat sampai pada mengusulkan rencanan pembangunan di kecamatan yang selanjutnya akan dibahas pada usulan program pembangunan di tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah dalam MUSRENBANG di tingkat kabupaten.

4.2.1.2. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Program Pembangunan

Untuk melihat sejauh mana peranan pemerintah Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi terhadap perencanaan pembangunan disajikan pada Tabel 4.12 di bawah ini

Tabel 4.12. Tanggapan Responden Apakah menurut Anda, peran pemerintah dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan pedesaan.

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Peran pemerintah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan pedesaan.	Sangat Baik	5	5	25	9%
	Baik	49	4	196	91%
	Kurang Baik	0	3	0	0%
	Tidak Baik	0	2	0	0%
	Sangat Tidak Baik	0	1	0	0%
Jumlah		54		221	100
Rata-rata				4,09	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Dari tabel 4.12 di atas sebanyak 91% atau sebagian besar dari responden menyatakan atau memberikan alternatif jawaban baik, dan 9% memberikan alternatif jawaban sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah sangat ingin melibatkan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam hal pembangunan partisipatif ini.

Pada tabel 4.13 di bawah ini menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan musyawarah pembangunan desa di Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah terbangun komunikasi dua arah yang baik antara pemerintah dan masyarakat hal ini ditunjukkan dengan 96% responden memberikan alternatif jawaban baik, dan 4% memberikan alternatif jawaban sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dua arah dalam musyawarah pembangunan desa ternyata berjalan efektif dalam rangka pemerintah daerah mendapatkan masukan untuk pembangunan yang lebih baik.

Tabel 4.13. Tanggapan Responden Apakah Penyelenggaraan kegiatan musyawarah pembangunan desa terbangun komunikasi dua arah yang baik antara pemerintah dan masyarakat

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Penyelenggaraan kegiatan musyawarah pembangunan desa terbangun komunikasi dua arah yang baik antara pemerintah dan masyarakat	Sangat Baik	2	5	10	4%
	Baik	52	4	208	96%
	Kurang Baik	0	3	0	0%
	Tidak Baik	0	2	0	0%
	Sangat Tidak Baik	0	1	0	0%
Jumlah		54		218	100
Rata-rata				4,04	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Untuk melihat sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ditampilkan pada Tabel 4.14 di bawah ini.

Tabel 4.14. Tanggapan Responden Apakah masyarakat sering terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Masyarakat sering terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa	Sangat Sering	0	5	0	0%
	Sering	50	4	200	93%
	Kurang Terlibat	4	3	12	7%
	Tidak Pernah	0	2	0	0%
	Sangat Tidak Pernah	0	1	0	0%
Jumlah		54		212	100
Rata-rata				3,93	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa 93% responden menyatakan sering terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan 7% menyatakan kurang terlibat, hal ini kembali menunjukkan bahwa peran serta masyarakat di Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap musyarawah perencanaan pembangunan desa cukup tinggi.

Selanjutnya untuk melihat tingkat antusias masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut ini.

Tabel 4.15. Tanggapan Responden apakah masyarakat mempunyai antusias yang tinggi akan adanya musyawarah pembangunan desa.

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Masyarakat mempunyai antusias yang tinggi akan adanya musyawarah pembangunan desa	Sangat Antusias	0	5	0	0%
	Antusias	51	4	204	94%
	Kurang Antusias	3	3	9	6%
	Tidak Antusias	0	2	0	0%
	Sangat Tidak Antusias	0	1	0	0%
Jumlah		54		213	100
Rata-rata				3,94	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Berdasarkan pada tabel 4.15 di atas ternyata tingkat antusias masyarakat mencapai 94% dan kurang antusias sebesar 6%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat antusias masyarakat cukup tinggi terhadap musyawarah pembangunan desa.

Untuk melihat sejauh mana tingkat kesesuaian antara pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa tersajikan pada Tabel 4.16 berikut ini.

Tabel 4.16. Tanggapan Responden Apakah menurut anda program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa	Sangat Sesuai	4	5	20	7%
	Sesuai	50	4	200	93%
	Kurang Sesuai	0	3	0	0%
	Tidak Sesuai	0	2	0	0%
	Sangat Tidak Sesuai	0	1	0	0%
Jumlah		54		220	100
Rata-rata				4,07	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Sebanyak 93% responden menyatakan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan sebanyak 7% responden menyatakan sangat sesuai, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah telah melaksanakan pembangunan pedesaan berdasarkan aspirasi dari masyarakatnya.

Untuk melihat sejauh mana masyarakat mengetahui apa yang menjadi program pembangunan di Kecamatan Merigi Kelindang dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut ini.

Tabel 4.17. Tanggapan Responden Apakah masyarakat mengetahui apa yang menjadi program pembangunan di kecamatan tersebut

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlah x skor	Persentase
Masyarakat mengetahui apa yang menjadi program pembangunan di kecamatan tersebut	Sangat Tahu	0	5	0	0%
	Tahu	30	4	120	56%
	Kurang Tahu	24	3	72	44%
	Tidak Tahu	0	2	0	0%
	Sangat Tidak Tahu	0	1	0	0%
Jumlah		54		192	100
Rata-rata				3,56	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata masyarakat cukup tahu apa yang menjadi program pembangunan yaitu 56%, akan tetapi masih ada masyarakat yang cukup tahu yaitu 44%, hal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya sosialisasi rencana program pembangunan pedesaan yang masih dirasakan kurang tahu oleh masyarakat pedesaan.

Sedangkan untuk sejauh mana musyawarah pembangunan pedesaan dapat mengatasi permasalahan pembangunan di tingkat desa dapat dilihat dari Tabel 4.18 berikut ini.

Tabel 4.18. Tanggapan Responden Apakah dengan adanya musyawarah pembangunan desa permasalahan yang ada dapat teratasi

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Dengan adanya musyawarah pembangunan desa permasalahan yang ada dapat teratasi	Sangat Dapat	13	5	65	24%
	Dapat	41	4	164	76%
	Kurang Dapat	0	3	0	0%
	Tidak Dapat	0	2	0	0%
	Sangat Tidak Dapat	0	1	0	0%
Jumlah		54		229	100
Rata-rata				4,24	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Dari total 54 responden ternyata musyawarah pembangunan pedesaan dapat mengatasi permasalahan yang ada yaitu 76% responden, sedangkan 24% responden menyatakan sangat dapat mengatasi. Hal ini dimungkinkan terjadi karena dalam musyawarah pembangunan pedesaan tersebut terjadi komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah daerah Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga permasalahan dapat didiskusikan dan dicarikan alternatif pemecahannya.

Tabel 4.19. Tanggapan Responden Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam membantu administrasi pembangunan pedesaan.

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Partisipasi masyarakat dalam membantu administrasi pembangunan pedesaan.	Sangat Besar	1	5	5	2%
	Besar	29	4	116	54%
	Cukup Besar	23	3	69	43%
	Kecil	1	2	2	2%
	Sangat Kecil	0	1	0	0%
Jumlah				192	100
Rata-rata				3,56	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Sedangkan untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat di Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah dalam membantu administrasi pembangunan pedesaan, ternyata cukup bervariasi, sebanyak 54% responden memberikan jawaban besar, 43% menyatakan cukup besar, dan 2% responden memberikan alternatif jawaban sangat besar.

Selanjutnya apakah setiap aktivitas kegiatan masyarakat di Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah ikut berperan penting dalam pencapaian keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel 4.20 di bawah ini.

Tabel 4.20. Tanggapan Responden Apakah setiap aktivitas kegiatan masyarakat ikut berperan penting dalam pencapaian keberhasilan program pembangunan

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Setiap aktivitas kegiatan masyarakat ikut berperan penting dalam pencapaian keberhasilan program pembangunan	Sangat Besar	1	5	5	2%
	Besar	16	4	64	30%
	Cukup Besar	37	3	81	69%
	Kecil	0	2	0	0%
	Sangat Kecil	0	1	0	0%
Jumlah				150	100
Rata-rata				3,33	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Dari beberapa alternatif jawaban ternyata 69% responden menyatakan cukup besar, 30% menyatakan besar, dan 2% responden menyatakan sangat besar, ini menunjukkan bahwa aktivitas keviatan masyarakat ternyata cukup berperan penting dalam pencapaian keberhasilan pembangunan di pedesaan.

Pada Tabel 4.21 berikut ini disajikan sejauh mana masyarakat ikut dalam memanfaatkan hasil dari pembangunan pedesaan.

Tabel 4.21. Tanggapan Responden sejauh mana masyarakat ikut dalam memanfaatkan hasil dari pembangunan pedesaan.

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Masyarakat ikut dalam memanfaatkan hasil dari pembangunan pedesaan.	Sangat Besar	4	5	20	7%
	Besar	24	4	96	44%
	Cukup Besar	26	3	78	48%
	Kecil	0	2	0	0%
	Sangat Kecil	0	1	0	0%
Jumlah				194	100
Rata-rata				3,59	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Dari alternatif jawaban yang diberikan responden ternyata 48% responden menyatakan cukup besar, 44% menyatakan besar, dan 7% menyatakan sangat besar, hal ini mengindikasikan bahwa program pembangunan pedesaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih cukup baik dilihat dari segi kemanfaatan pembangunan tersebut.

Dalam hal untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan pedesaan ternyata dari 10 pertanyaan yang diajukan kepada 54 responden masih dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dirasakan sangat perlu dan penting bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan pedesaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan. Disamping itu adanya sumbangan pemikiran dan gagasan dari masyarakat mempunyai arti bahwa peran dan keterlibatan masyarakat sudah berjalan cukup baik.

4.2.1.3. Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Pedesaan di Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah

Demi suksesnya pelaksanaan pembangunan di tingkat desa maka haruslah setiap kegiatan yang akan dilaksanakan didasarkan pada pendekatan *target-oriented* yang bersifat lokal, karena sifatnya yang lokal maka hanya ada beberapa *stakeholder* saja yang perlu dicermati dalam pelaksanaan pembangunan. Jumlah *stakeholder* yang tidak begitu besar juga merupakan kelebihan dari pendekatan pembangunan ini, karena kemungkinan untuk memuaskan seluruh keinginan/aspirasi *stakeholder* menjadi bertambah besar.

Untuk melihat sejauh mana program pembangunan yang ada sudah berpihat terhadap kebutuhan masyarakat setempat dapat dilihat pada Tabel 4.22 berikut ini.

Tabel 4.22. Tanggapan Responden sejauh mana program pembangunan yang ada sudah berpihat terhadap kebutuhan masyarakat setempat

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Program pembangunan yang ada sudah berpihat terhadap kebutuhan masyarakat setempat	Sangat Besar	2	5	10	4%
	Besar	29	4	116	54%
	Cukup Besar	23	3	69	43%
	Kecil	0	2	0	0%
	Sangat Kecil	0	1	0	0%
Jumlah				195	100
Rata-rata				3,61	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Pada tabel di atas ternyata 54% responden menyatakan program pembangunan pedesaan yang ada selama ini sudah berpihak terhadap kebutuhan masyarakat, 43% menyatakan cukup besar, dan 4% menyatakan sangat besar. Hal ini mendikikasikan bahwa pembangunan yang dilakukan ternyata sudah berpihak terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan.

Tabel 4.23. Tanggapan Responden apakah sistem perencanaan pembangunan yang sudah ada selama ini dapat menampung seluruh usulan dari masyarakat

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Sistem perencanaan pembangunan yang sudah ada selama ini dapat menampung seluruh usulan dari masyarakat.	Sangat Besar	0	5	0	0%
	Besar	33	4	132	61%
	Cukup Besar	21	3	63	39%
	Kecil	0	2	0	0%
	Sangat Kecil	0	1	0	0%
Jumlah				195	100
Rata-rata				3,61	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Pada Tabel 4.23 di atas ini dapat dilihat bahwa sistem perencanaan pembangunan yang sudah ada selama ini dapat menampung seluruh usulan dari masyarakat, hal ini terlihat dari 61% responden menyatakan besar, 39% menyatakan cukup besar. Dari jawaban responden yang ada maka dapat dikatakan bahwa sitem perencanaan pembangunan selama ini ternyata dapat menampung aspirasi pembangunan yang ada di pedesaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa aspirasi masyarakat telah ditampung dan diakomodir hal ini tergambar dari hasil yang menyatakan bahwa alternatif jawaban berada pada alternatif besar dan cukup besar.

Untuk melihat apakah program pembangunan di Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah sudah berjalan dengan baik dapat dilihat pada Tabel 4.24 berikut ini.

Tabel 4.24. Tanggapan Responden apakah program pembangunan di Kecamatan Merigi Kelindang sudah berjalan dengan baik

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Program pembangunan di Kecamatan Merigi Keelindang sudah berjalan dengan baik	Sangat Baik	2	5	10	4%
	Baik	52	4	208	96%
	Kurang Baik	0	3	0	0%
	Tidak Baik	0	2	0	0%
	Sangat Tidak Baik	0	1	0	0%
Jumlah				218	100
Rata-rata				4,04	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Dari total 54 responden 96% responden menyatakan pembangunan sudah berjalan dengan baik, dan 4% menyatakan sangat baik, maka dapat disimpulkan bahwa program pembangunan yang ada di Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah ternyata sudah berjalan dengan baik.

Selanjutnya untuk melihat tingkat kesesuaian antara program pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah dengan hasil musyawarah pembangunan desa yang telah dilaksanakan sebelumnya disajikan pada Tabel 4.25 berikut ini.

Tabel 4.25. Tanggapan Responden apakah terdapat kesesuaian antara program pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah dengan hasil musyawarah pembangunan desa yang telah dilaksanakan sebelumnya disajikan

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Terdapat kesesuaian antara program pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan hasil musyawarah pembangunan desa yang telah dilaksanakan sebelumnya	Sangat Sesuai	0	5	0	0%
	Sesuai	54	4	216	100%
	Kurang Sesuai	0	3	0	0%
	Tidak Sesuai	0	2	0	0%
	Sangat Tidak Sesuai	0	1	0	0%
Jumlah				216	100
Rata-rata				4,00	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Dari Tabel 4.25 di atas menyatakan bahwa 100% responden menyatakan bahwa terdapat kesesuaian antara program pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di

Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah dengan hasil musyawarah pembangunan desa yang telah dilaksanakan sebelumnya. Hal ini mendikasikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tetap konsisten pada usulan dari masyarakat pedesaan.

Selanjutnya untuk melihat sejauhmana perencanaan partisipatif sudah sesuai antara target sasaran dengan harapan dan tuntutan masyarakat di Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah disajikan pada Tabel 4.26 di bawah ini.

Tabel 4.26. Tanggapan Responden Berdasarkan pengalaman apakah perencanaan partisipatif sudah sesuai antara target sasaran dengan harapan dan tuntutan masyarakat

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlah x skor	Persentase
Berdasarkan pengalaman perencanaan partisipatif sudah sesuai antara target sasaran dengan harapan dan tuntutan masyarakat.	Seluruhnya	0	5	0	0%
	Sebagian Besar	35	4	140	65%
	Cukup Besar	18	3	54	33%
	Sebagian Kecil	1	2	2	2%
	Tidak Sama Sekali	0	1	0	0%
Jumlah				196	100
Rata-rata				3,63	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Berdasarkan pengalaman dari responden ternyata perencanaan partisipatif sudah sesuai antara target sasaran dengan harapan dan tuntutan masyarakat, ini terlihat dari 65% responden menyatakan sebagian besar, 33% menyatakan cukup besar dan hanya 2% menyatakan sebagian kecil.

Pada Tabel 4.27 di bawah ini dapat dilihat apakah rencanan kegiatan perencanaan yang dirumuskan di Kecamatan Merigi Kelidang Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai kejelasan tujuan yang akan dicapai.

Tabel 4.27. Tanggapan Responden apakah rencana kegiatan perencanaan yang dirumuskan mempunyai kejelasan tujuan yang akan dicapai

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Rencana kegiatan perencanaan yang dirumuskan mempunyai kejelasan tujuan yang akan dicapai.	Sangat Jelas	2	5	10	4%
	Jelas	52	4	208	96%
	Kurang Jelas	0	3	0	0%
	Tidak Jelas	0	2	0	0%
	Sangat Tidak Jelas	0	1	0	0%
Jumlah				218	100
Rata-rata				4,04	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 96% responden menyatakan jelas dan 4% responden menyatakan sangat jelas. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi karena rencana pembangunan melalui musyawarah di tingkat desa telah menyerap aspirasi dari masyarakat sehingga apa yang menjadi keinginan dari masyarakat dapat direalisasikan dengan baik.

Selanjutnya untuk melihat tingkat kesesuaian antara perencanaan partisipatif yang direncanakan ada kesesuaian dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4.28 di bawah ini.

Tabel 4.27. Tanggapan Responden apakah perencanaan partisipatif yang direncanakan ada kesesuaian dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Perencanaan partisipatif yang direncanakan ada kesesuaian dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.	Sangat Sesuai	2	5	10	4%
	Sesuai	52	4	208	96%
	Kurang Sesuai	0	3	0	0%
	Tidak Sesuai	0	2	0	0%
	Sangat Tidak Sesuai	0	1	0	0%
Jumlah				218	100
Rata-rata				4,04	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Dilihat dari jawaban responden ternyata 96% responden menyatakan sesuai dan 4% responden menyatakan sangat sesuai. Dari jawaban yang didapat dari responden ternyata tingkat kesesuaian antara perencanaan pembangunan partisipatif yang direncanakan di

Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Hal ini sekali lagi dimungkinkan terjadi dikarenakan dalam musyawarah pembangunan pedesaan dapat menyerap aspirasi dari masyarakat sehingga pembangunan yang dilakukan dapat ditetapkan berdasarkan skala prioritas dari kebutuhan dari masyarakat desa itu sendiri.

Selanjutnya Tabel 4.29 berikut ini disajikan bagaimana keterkaitan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dari berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan pedesaan di Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah.

Tabel 4.29. Tanggapan Responden apakah perencanaan partisipatif yang direncanakan ada kesesuaian dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Keterkaitan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dari berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan pedesaan.	Sangat Tinggi	39	5	195	72%
	Tinggi	5	4	20	9%
	Cukup Tinggi	10	3	30	19%
	Rendah	0	2	0	0%
	Sangat Rendah	0	1	0	0%
Jumlah				245	100
Rata-rata				4,54	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Dari Tabel 4.29 di atas ternyata keterkaitan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dari berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan pedesaan sangatlah tinggi (72%), cukup tinggi (19%) dan menyatakan sangat tinggi 9%. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah baik.

Untuk melihat apakah pengambilan keputusan dalam perencanaan partisipatif sudah mengakomodir hasil kesepakatan bersama disajikan pada Tabel 4.30 di bawah ini.

Tabel 4.30. Tanggapan Responden apakah pengambilan keputusan dalam perencanaan partisipatif sudah mengakomodir hasil kesepakatan bersama

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Pengambilan keputusan dalam perencanaan partisipatif sudah mengakomodir hasil kesepakatan bersama	Seluruhnya	1	5	5	2%
	Sebagian Besar	35	4	140	65%
	cukup Besar	18	3	54	33%
	Sebagian Kecil	0	2	0	0%
	Sangat Rendah	0	1	0	0%
Jumlah				199	100
Rata-rata				3,69	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Dari alternatif jawaban responden 65% menyatakan 65% memberkan jawaban sebagian besar, 33% menyatakan cukup besar dan 2% meyatakan seluruhnya. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam hal pengambilan keputusan dalam perencanaan partisipatif sebagian besar responden menyatakan terakomodir. Secara keseluruhan pemerintah daerah masih tetap mengutamakan peran serta dari masyarakat dalam hal memutuskan pembangunan ditingkat pedesaan dengan harapan dapat mengakomodir aspirasi dan keinginan dari masyarakat yang merasakan langsung dari dampak pembangunan di daerahnya.

Tabel 4.31. Tanggapan Responden Sejauhmana peran perencanaan parrtisipatif dalam pembuatan keputusan yagn dibutuhkan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pedesaan

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	Skor	Jumlahx skor	Persentase
Peran perencanaan parrtisipatif dalam pembuatan keputusan yagn dibutuhkan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pedesaan	Sangat Tinggi	2	5	10	4%
	Tinggi	31	4	124	57%
	cukup Tinggi	21	3	63	39%
	Rendah	0	2	0	0%
	Sangat Rendah	0	1	0	0%
Jumlah				197	100
Rata-rata				3,65	

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2023

Dalam hal mengetahui sejauhmana peran perencanaan partisipatif dalam pembuatan keputusan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pedesaan dapat dilihat pada tabel 4.31 di atas. Dapat disimpulkan bahwa peran perencanaan partisipatif

dalam pembuatan keputusan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pedesaan dirasakan Tinggi yaitu 57%, sangat tinggi 4% dan cukup tinggi 39%. Hal ini menunjukkan bahwa peran perencanaan partisipatif sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi dan mengetahui kebutuhan apa yang paling diinginkan oleh masyarakat pedesaan.

4.2.2. Alternatif Pemecahan Masalah

Secara keseluruhan peranan perencanaan partisipatif masyarakat pedesaan terhadap program pembangunan pedesaan masih sangat diperlukan, hal ini ditunjukkan dengan

tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan ditingkat desa yang tetap melibatkan masyarakat untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat.

Upaya-Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang di hadapi Camat merigi kelindang dalam melaksanakan perencanaan Pembangunan adalah sebaga berikut

1. Perlu mengikut sertakan masyarakat dalam Perencanaan pembangunan untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat.
2. Perlu dilakukan komunikasi dalam penyusunan program pembangunan pedesaan terutama dalam Perencanaan Pembangunan, agar meningkatkan rasa kesadaran masyarakat bahwa pembangunan adalah untuk masyarakat itu sendiri.
3. Perlu diupayakan pengawasan lebih efektif dalam implementasi Program Pembangunan apabila telah terlaksana sehingga bisa berjalan seperti yg diharapkan masyarakat dan pemerinta.

Dalam hal pembuatan keputusan, pengambilan keputusan dan penyusunan program perencanaan yaitu adanya sumbangan pikiran dan gagasan yang muncul dari masyarakat sudah berjalan dengan sangat baik. Artinya masyarakat memilih untuk berperan dan terlibat secara utuh dalam perencanaan guna menentukan arah dan agenda pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para nara sumber yaitu:

1. Camat Merigi Kelindang, Ketua Bappeda Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dinyatakan cukup dalam mendukung perencanaan yang ada saat ini.
2. Partisipasi masyarakat masih sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi dan mendapatkan dukungan yang positif untuk program pembangunan di pedesaan.
3. Perencanaan pembangunan dengan menggunakan perencanaan partisipatif dinyatakan sudah berjalan cukup baik, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam tata cara musyawarah ditingkat desa.

Secara umum perencanaan partisipatif ini masih sangat perlu dilakukan karena pemerintah daerah dan masyarakat dapat sejalan dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan. Proses perencanaan partisipatif melalui musyawarah pembangunan ditingkat pedesaan masih sangat diperlukan untuk menampung aspirasi dari masyarakat agar pembangunan dapat tepat sasaran. Proses perencanaan partisipatif ini telah sesuai dengan petunjuk dari pemerintah, yaitu melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) mulai dari musrenbang ditingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan akhirnya ditingkat provinsi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Camat sebagai perpajangan tangan pemerintah terhadap usulan program pembangunan pedesaan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari terselenggaranya diskusi dua arah antara pemerintahan kecamatan dan masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kecamatan. Usulan masyarakat diakomodir dan diteruskan oleh Camat selaku wakil masyarakat untuk diusulkan dalam program pembangunan yang dibawah ke Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) di Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan pedesaan disimpulkan masih tinggi. Hal ini tercermin dari tingkat kemauan dari pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih cukup tinggi. Masyarakat mengetahui mekanisme penyusunan program pembangunan pedesaan di kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan tingkat partisipasi yang tinggi dan sebagian besar masyarakat mengetahui bagaimana cara mereka berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Kemudian keselarahan antara perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan dinyatakan masyarakat selaras dengan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu pula peran perencanaan partisipatif masyarakat pedesaan terhadap program pembangunan pedesaan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berjalan dengan baik. Keikutsertaan masyarakat dalam hal memberkan masukan dan keterbukaan dari pemerintah daerah dalam menampung aspirasi untuk menyusun rencana pembangunan juga sangat baik.

5.2. Saran

Bagi pemerintah daerah faktor-faktor penunjang pembangunan seperti dana, sumber daya manusia masih dirasakan sangat kurang, hal ini tergambar dari masih kurang berkembangnya tingkat pembangunan di Kecamatan Merigi Kelindang. Selanjutnya dukungan sumber daya manusia dan dukungan dana dari pemerintah masih sangat diharapkan oleh masyarakat untuk percepatan pembangunan di daerah.

Dalam rangka penerapan proses perencanaan partisipatif terhadap implementasi pembangunan pedesaan dimasa yang akan datang sebaiknya disamping adanya sasaran dan prioritas juga harus diperhatikan adalah gagasan-gagasan apa yang muncul dan berkembang dimasyarakat karena hal ini wujud dari kebutuhan riil yang ada dimasyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak sia-sia.

Sebagai implementasi dari program pembangunan pedesaan pengambil kebijakan harus memperhatikan apa saja yang menjadi sasaran dan prioritas yang dikehendaki oleh masyarakat sehingga dengan keterbatasan sumber dana yang tersedia di pedesaan dapat ditentukan prioritas apa yang menjadi kebutuhan riil di masyarakat.

Di masa yang akan datang sebaiknya pembangunan di pedesaan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan sifat, ciri dan potensi daerahnya serta tidak dapat disamakan atau diseragamkan begitu saja keseluruhan dengan desa-desa yang lain. Pendekatan pembangunan yang dimaksudkan adalah pendekatan pembangunan pedesaan yang memberdayakan masyarakat berdasarkan pada konsep perencanaan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. (2002). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi.
- Agus, H. (2009). *Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)*. . Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Mohamad Iqbal, B (2007). *Metode Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Masyarakat*. <http://eeqbal.blogspot.com/2007/12/metode-perencanaanpartisipatif-dalam.html>.
- Bratakusumah, R. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Ghalia Pustaka Utama.
- Friedman, I. d. (1988). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hikmat, H. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Edisi Revisi)*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga .
- Randy R, W. R. (2009). *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Badiklat Kemhan. PT. Gramedia .
- Tudaro, M. P. (1998). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Edisi Keenam, Erlangga.
- Wijaya, A. (2003). *Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: P2ELIPI.

LAMPIRAN FOTO









Bersama Kepala bidang
Diklat BKPSDM
kabupaten Bengkulu
tengah



Bersama Perangkat desa
desa penembang



Pembahasan tentang
Perencanaan
pembangunan d desa
bajak.



koordinasi dengan kepala desa kelindang atas tentang perencanaan pembanguna usaha jamur tiram.



foto bareng bersama kasih dan staf kantor camat Merigi kelindang.



Sosialisasi tentang perencanaan pembangunan d kecamatan Merigi kelindang dengan kepala Desa dan BPD



Rancangan pembangunan tempat pemeliharaan jamur tiram di desa Kelindang atas



Mengikuti kegiatan kantor camat kecamatan Merigi kelindang



bersama kepala desa dan prangkat desa kelindang atas



Membahas rancangan musawarah desa d desa penembang.



mengikuti kegiatan kecamatan

bersama kepala
desa, babin kantikmas
dan pangkat desa bajak.



koordinasi dengan bapak
camat kecamatan Merigi
kelindang kabupaten
Bengkulu Tengah



RIWAYAT HIDUP PENULIS



YARMI, SE.,M.E., Penulis dari Laporan Praktik Profesi Kepamongperajaan lahir di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu pada tanggal 01 April 1985. Penulis lahir dari pasangan ayah bernama Alaihim dan Ibu bernama Yamuda Penulis merupakan anak ke Dua dari Tiga bersaudara. Penulis memiliki Putra Satu dan Putri Satu sebagai buah hati dari pasangan bernama Endang Firmansyah.

Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh Penulis di SD Negeri Dua Sembilan Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah Sekolah Menengah Pertama pulis selesaikan di SMP III di Kabupaten yang sama. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA I Taba Penanjung Selanjutnya diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana di Proqram Pasca Sarjana Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.